

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2017 – 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Setda berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 6/SEKDA/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Tim Penyusun Renstra Setda berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Nomor: 03/PEP/TPR/II/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2017;

- b) melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
 - c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
 - d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
 3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan Renstra PD Tahun 2017-2022
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Sekretariat Daerah dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Umum, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Bappeda, dan Kepala/perwakilan dari masing-masing Bagian. Forum tersebut membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Setda. Hasil dari forum tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Cascading Renstra Setda 2017-2022 Nomor 130/3407.
 5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan DIY
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah

2.1.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

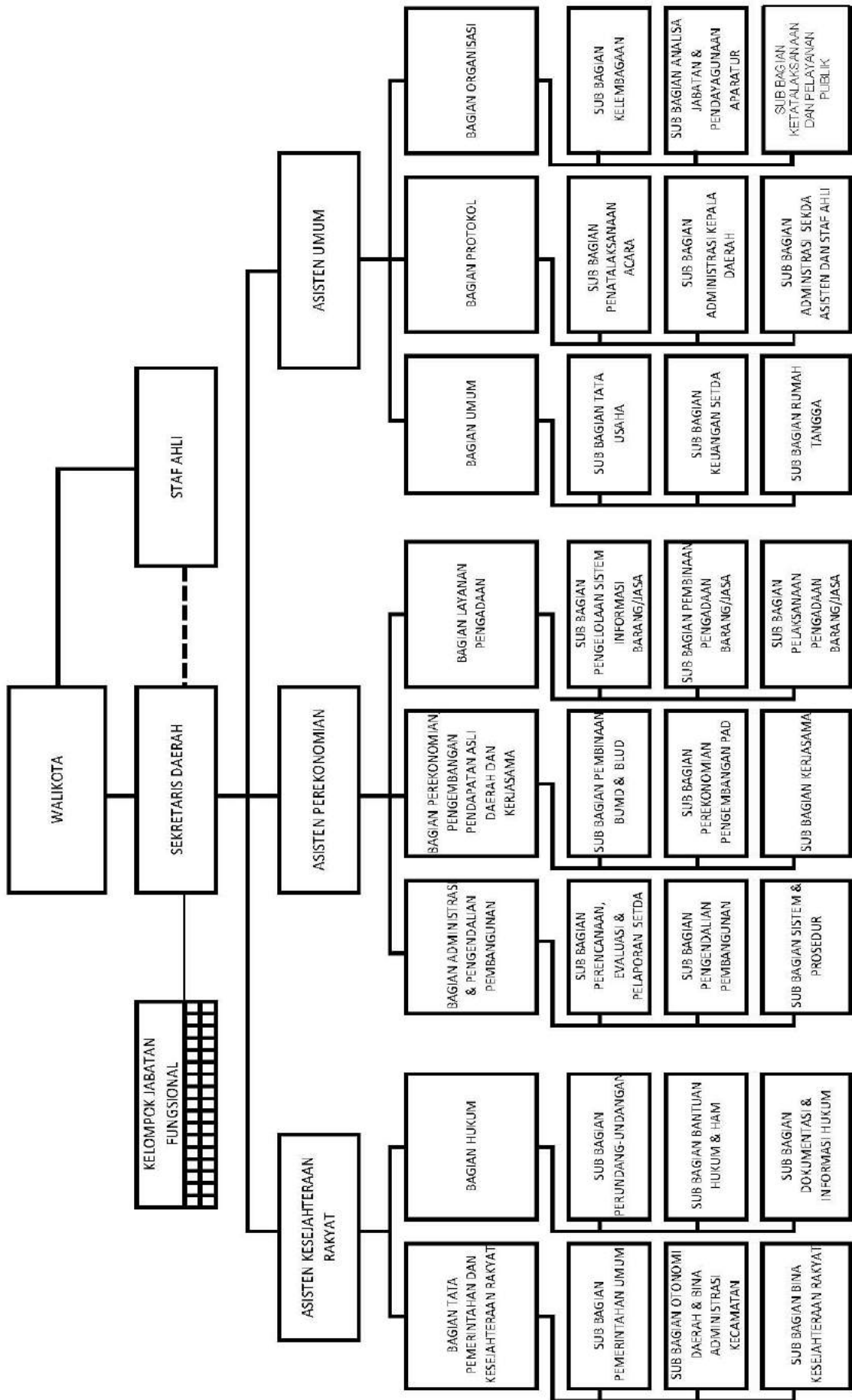
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.
 - 2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Asisten Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Protokol, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
 - 2) Bagian Umum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; dan
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan Daerah;
2. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan.

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.

Fungsi Bagian P3ADK:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu

bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6. Tugas pokok Bagian Umum:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha, bidang keuangan Sekretariat Daerah, serta bidang rumah tangga.

Fungsi Bagian Umum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;

- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.

Fungsi Bagian Protokol:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 180 orang (data per Januari 2017). Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1 orang
Asisten Perekonomian	1 orang
Asisten Umum	1 orang
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	8 orang
Kepala Sub Bagian	24 orang
Staf	112 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	29 orang
TOTAL	180 orang

Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	20 orang
III	111 orang
II	17 orang
I	3 orang
TOTAL	151 orang

Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	7 orang
III	8 orang
IV	24 orang
Staf	112 orang
TOTAL	151 orang

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	26 orang	17,2%
S1	76 orang	50,3%
D3	12 orang	8,0%
SMA/SMK	32 orang	21,2%
SMP	5 orang	3,3%
SD	-	-
TOTAL	151 orang	100%

Tabel 2.5

Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	1 orang	3,45%
S1	9 orang	31,03%
D3	6 orang	20,69%
D2	1 orang	3,45%
SMA/SMK	11 orang	37,93%
SMP	1 orang	3,45%
SD	-	-
TOTAL	29 orang	100%

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Sekretaris Daerah	1				1 orang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	1				1 orang
Asisten Perekonomian	1				1 orang
Asisten Umum	1				1 orang
Staf Ahli	3				3 orang
Bagian Umum					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf PNS		8	5	1	14 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	5 orang
Bagian Organisasi					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf PNS	2	12		1	15 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	3 orang
Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2			3 orang
Staf PNS		10			10 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	2 orang

Organisasi	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Bagian Hukum					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2			3 orang
Staf PNS		8	2		10 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	2 orang
Bagian Protokol					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf PNS		15	6		21 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	9 orang
Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf PNS		4	2	1	7 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	-
Bagian Layanan Pengadaan					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian	1	2			3 orang
Staf PNS		19	2		21 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	5 orang
Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama					
Kepala Bagian	1				1 orang
Kepala Sub Bagian		3			3 orang
Staf PNS		14			14 orang
Staf non PNS (naban)	-	-	-	-	3 orang
TOTAL					180 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2017

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Merk/Tipe	Harga Satuan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
1	AC split	4	national / AC split National	9.000.000	Bagian Hukum
2	Air Purifier (CHT)	2	Sharp FU-A28Y / -	1.275.000,55	Bagian Hukum
3	Almari buku	1	Orbitrend / OSR 1081	1.036.480,20	Bagian Hukum
4	ALMARI LOKER KENDALI BESI	3	Brother / Brother B-212	2.100.362,02	Bagian Hukum
5	BRANKAS	2	ICIBAN / BRANKAS ICIBAN	1.000.000	Bagian Hukum
6	Filling besi/metal	14	Globe/Filling besi Globe / -	400.000	Bagian Hukum
7	Jeep	1	SsangYong / Rexton	448.500.000	Bagian Hukum
8	kamera digital	1	Sony / DSC W80	2.736.000	Bagian Hukum
9	Kamera Video Digital	1	JVC / GZ MS100	3.535.000	Bagian Hukum
10	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bagian Hukum
11	Kursi kerja	55	Futura FTR 405 / -	227.250	Bagian Hukum
12	Kursi rapat lipat	21	Nila / -	215.100	Bagian Hukum
13	Laptop	4	lenovo / Laptop lenovoV100	15.995.000	Bagian Hukum
14	Layar Projector Tripod 96	2	Tripod / Screen D-Light TSDL 2424 L	1.970.240,64	Bagian Hukum
15	LCD Projector	2	Nec / M260X	6.166.824,19	Bagian Hukum
16	LED TV	1	LG 22LN 4050 / -	1.872.610,01	Bagian Hukum
17	LEMARI BESI/METAL	3	GLOBE / LEMARI BESI GLOBE	600.000	Bagian Hukum
18	Lemari kayu	8	- / -	37.500	Bagian Hukum
19	Lemari sorok	14	- / -	25.000	Bagian Hukum
20	MEJA CUBICAL	16	Informa / SBW S4-R140	5.506.875,24	Bagian Hukum
21	meja rapat	9	highpoint ODO36 / -	650.000	Bagian Hukum
22	Meja kerja	37	- / -	33.000	Bagian Hukum
23	meja tamu	3	- / -	200.000	Bagian Hukum
24	Mesin Facsimile	1	Sharp UX 23 / -	1.450.000	Bagian Hukum
25	MESIN KETIK PORTABLE	4	EXPRES / MESIN KETIK EXPRES	1.025.000	Bagian Hukum
26	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bagian Hukum
27	Minibus	1	Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New	151.947.983,4	Bagian Hukum
28	papan pengumuman	1	- / -	10.000	Bagian Hukum
29	PC unit	10	Zyrex / -	7.130.000	Bagian Hukum
30	Pesawat Telepon	2	Siemen / Siemen	800.000	Bagian Hukum
31	printer	7	HP / printer HPlaserjet1010	1.669.000	Bagian Hukum
32	RAK BESI/METAL	3	- / -	350.000	Bagian Hukum
33	Scanner Folio	1	EPSON GT1500 / -	3.003.737,64	Bagian Hukum
34	Sepeda Motor	4	YAMAHA / YAMAHA YUPITER 5LM	11.580.000	Bagian Hukum
35	SEPEDA ONTEL	1	POLYGONSIRRO / SEPEDA POLYGO	1.225.000	Bagian Hukum
36	stabilisator	6	bonic / stabilisator bonic	200.000	Bagian Hukum
37	tape recorder	1	sony / tape recorder SonyTCM200DV	1.165.000	Bagian Hukum
38	UPS	1	APC / BE525-AS	507.327,22	Bagian Hukum
39	White board	2	- / -	90.000	Bagian Hukum
40	Wireles	1	TOA / Wireles TOAZW770C(E)	5.585.000	Bagian Hukum
41	AC	59	Panasonic / CS-PC18GKP	6.940.239,69	Bagian Umum
42	AIR PURIFIER	6	Blueair / Air Purifier Pro M Smokestop	9.325.988,73	Bagian Umum
43	Alat Pemotong/Penghancur Kertas	2	- / -	1.050.000	Bagian Umum
44	Almari Lereg Kaca	8	Brother / B-304	1.880.000	Bagian Umum
45	Bateray Charger	2	BC 900 / -	19.050.000	Bagian Umum
46	Bor listrik	1	- / -	375.000	Bagian Umum
47	Brankas	2	- / -	3.441.000	Bagian Umum
48	Cabinet rack + Roller (16 U)	1	- / -	1.680.000	Bagian Umum
49	Cash Box	1	Ichiban / D-3000	435.950	Bagian Umum
50	Cassette & CD Player	1	Tascam / CDA500	4.617.101,37	Bagian Umum
51	Coffe Table	2	- / -	1.150.000	Bagian Umum
52	Crossover Aktive	1	Samson 3 Way / -	2.756.000	Bagian Umum
53	Delegate Unit	12	TS 902 / -	13.705.251,47	Bagian Umum
54	Digital Reverb & Multi Effect	1	Zoom RFX-2200 / -	2.500.000	Bagian Umum
55	Drive rack	1	DBX 220i / -	10.032.000	Bagian Umum
56	DVD player	2	PHILIPS / -	400.000	Bagian Umum
57	Dynamic Microphone	26	Shure / SM58	1.440.000	Bagian Umum

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Merk/Tipe	Harga Satuan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
58	Equalizer	3	DOD SR-231Q / -	2.250.000	Bagian Umum
59	Filling Cabinet	21	Brother / B-104	1.275.000	Bagian Umum
60	Genset	4	Superwatt / -	75.106.257,68	Bagian Umum
61	Handy Talkie (HT) VHF	2	ICOM, IC-V80 / -	1.542.636,10	Bagian Umum
62	Infrared transmitter	4	TS 905 / TS 905	11.670.410,64	Bagian Umum
63	Kamera Foto Digital	1	Sony / DCS-W110	1.848.000	Bagian Umum
64	Kipas Angin	23	- / -	78.000	Bagian Umum
65	Komputer PC	18	Asus / D310MT	9.113.320,66	Bagian Umum
66	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bagian Umum
67	Kursi Kerja	144	- / -	577.500	Bagian Umum
68	kursi makan	58	- / -	400.000	Bagian Umum
69	Kursi Rapat Lipat	664	Futura Type FTR 501 / -	219.709,28	Bagian Umum
70	Kursi Tunggu Kayu	5	Handmade / -	1.606.498,12	Bagian Umum
71	Layar LCD	4	Screen View / -	605.363,45	Bagian Umum
72	LCD Proyektor	2	NEC / NP 100	6.000.000	Bagian Umum
73	Lemari Besi	13	- / -	500.000	Bagian Umum
74	Lemari Kayu	23	- / -	150.000	Bagian Umum
75	Meja Bifet	6	- / -	40.000	Bagian Umum
76	Meja kerja	63	- / -	35.000	Bagian Umum
77	Meja Knap	24	- / -	500.000	Bagian Umum
78	Meja Kursi Tamu	3	- / Bahan Jati, Fin Pelitur	4.963.823,83	Bagian Umum
79	MEJA MAKAN	11	Handmade / -	9.000.000	Bagian Umum
80	MEJA OPERATOR	4	- / -	0	Bagian Umum
81	Meja Podium	3	- / -	275.000	Bagian Umum
82	Meja Rapat	241	Handmade / -	857.598,22	Bagian Umum
83	Mesin Faximile	6	Panasonic / KX-FT503	1.465.572,01	Bagian Umum
84	mesin ketik	1	- / -	200.000	Bagian Umum
85	Mesin Penghisap Debu	3	Panasonic / MC-4620	1.483.140,45	Bagian Umum
86	Mesin potong rumput	6	- / -	950.000	Bagian Umum
87	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bagian Umum
88	microphone	3	- / -	475.000	Bagian Umum
89	Mixer	7	Soundcraft / MFXi-12	9.405.000	Bagian Umum
90	Notebook	6	DELL / INSPIRON 14R 5437	8.583.525,68	Bagian Umum
91	Pick Up	1	Mitsubishi / Colt L 300	92.500.000	Bagian Umum
92	Pompa Air	12	NASIONAL / -	3.392.500	Bagian Umum
93	Power Amplifier	14	Martin Caustic / MC 8000	8.380.000	Bagian Umum
94	Printer	12	Epson / LQ 2090	6.181.000	Bagian Umum
95	PROJECTOR	2	Sony / VPL-DW120	6.549.991,03	Bagian Umum
96	Radio tape	2	- / -	1.404.000	Bagian Umum
97	Receiver Infrared	2	TS905 TRANSMITER RECIEVER / -	2.871.000	Bagian Umum
98	Scanner A4	3	Canon / CanoScan LiDE110	896.421,61	Bagian Umum
99	Sepeda	4	Polygon Siera CX / -	1.962.000	Bagian Umum
100	Sepeda Motor	9	ASTREA IMPRESA / -	4.500.000	Bagian Umum
101	Snake cable + hard case	1	Peavey 32PR100 24 / 8 33M	13.851.000	Bagian Umum
102	Sofa	8	- / -	1.675.000	Bagian Umum
103	Sound system	2	TOA ZA D500 / TOA SR H2s / TOA M	74.486.836,23	Bagian Umum
104	Speaker	33	JK Caustic / JND 152	11.720.000	Bagian Umum
105	Spilter	1	YW 1024 Distributor / YW 1024 Distrib	4.189.378,18	Bagian Umum
106	Stabilizer Travo	2	Matsunaga ex Japan / -	10.500.000	Bagian Umum
107	Stage Monitor Processor, Sound St	1	- / -	1.650.000	Bagian Umum
108	Stand Microphone	10	- / -	0	Bagian Umum
109	Station Wagon	7	Suzuki / APV	132.500.000	Bagian Umum
110	TAPE	2	- / -	250.000	Bagian Umum
111	Televisi	15	Samsung / LCD	15.000.000	Bagian Umum
112	Tempat Parkir Sepeda	1	- / -	2.551.973,68	Bagian Umum
113	Tiang Mik Duduk	7	Max / -	137.001	Bagian Umum
114	TX/RX Infrared Recevier	4	YW 1024 DITRIBUTOR / -	9.451.000	Bagian Umum
115	UPS	2	Libert, 600 VA / -	800.000	Bagian Umum
116	White Board	7	- / -	25.000	Bagian Umum
117	Wireless	6	TOA / -	779.500	Bagian Umum
118	AC	5	National / National	5.650.000	Bagian Organisasi
119	Air Purifier (CHT)	2	Sharp FU-A28Y / -	1.275.000,55	Bagian Organisasi
120	Almari Besi Lereg Kaca	6	Brother / B-304	2.004.504,78	Bagian Organisasi
121	Brankas	1	ichiban / -	1.455.000	Bagian Organisasi
122	Cassette Recorder	1	Pollytron / -	320.000	Bagian Organisasi
123	digital Voice recorder USB	1	samsung YP-U2 / -	475.000	Bagian Organisasi
124	Eksternal DVD RW	1	- / -	350.000	Bagian Organisasi
125	External Hardisk	12	Seagate / -	545.000	Bagian Organisasi
126	FILLING BESI	12	VIP.V-304 / -	1.150.000	Bagian Organisasi
127	Kamera Foto Digital	2	Sony DSC-W730 / -	1.901.712,01	Bagian Organisasi
128	KAMERA VIDEO DIGITAL	1	Sony / HDR-CX240/E	3.224.610,97	Bagian Organisasi
129	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bagian Organisasi
130	Kursi Kerja	32	- / -	240.000	Bagian Organisasi

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Merk/Tipe	Harga Satuan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
131	Kursi rapat	82	Futura / Futura	175.000	Bagian Organisasi
132	Layar Film/LCD	2	drapper sei star wallscreen / -	874.000	Bagian Organisasi
133	LCD Projector	4	Epson / -	7.450.000	Bagian Organisasi
134	Lemari Kayu	2	- / 185 x 95 x 50	318.000	Bagian Organisasi
135	Lemari Sorok	5	- / -	1.200.000	Bagian Organisasi
136	Meja kerja	26	- / -	160.000	Bagian Organisasi
137	meja rapat	14	- / -	292.500	Bagian Organisasi
138	meja telpon	3	- / 75 x 70 x 50	150.000	Bagian Organisasi
139	Mesin Faxsimile	1	Sharp / UX-23	988.800	Bagian Organisasi
140	Mesin ketik	2	Olivetti / -	1.250.000	Bagian Organisasi
141	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bagian Organisasi
142	Minibus	1	Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New	151.947.983,4	Bagian Organisasi
143	Notebook	6	Lenovo / G430	7.422.000	Bagian Organisasi
144	white board	3	- / 100 x 120	57.000	Bagian Organisasi
145	PC. Unit	4	Lenovo / Idea Centre H230-021	8.521.088,16	Bagian Organisasi
146	Pesawat telephone	1	pansonik KX-TS 505 MX / -	258.000	Bagian Organisasi
147	Printer	4	HP P1505 / -	2.375.000	Bagian Organisasi
148	rak besi	2	BROTHER b.901 / -	350.000	Bagian Organisasi
149	Rak Kayu	2	- / -	70.000	Bagian Organisasi
150	Scanner	1	CanoScan / LiDE100	756.704,31	Bagian Organisasi
151	sepeda	1	Polygon-sirro / 26 speed / -	1.225.000	Bagian Organisasi
152	Sepeda Motor	3	Honda Supra Fit / -	9.050.000	Bagian Organisasi
153	Speaker	1	- / -	2.600.000	Bagian Organisasi
154	Station Wagon	1	Suzuki / Carry Futura ST.160	90.000.000	Bagian Organisasi
155	TV 21"	2	Sharp / 21GXF-250	1.400.000	Bagian Organisasi
156	UPS	2	APC-RS 1000 / -	200.000	Bagian Organisasi
157	Zice	2	- / -	513.000	Bagian Organisasi
158	1 set kursi tamu Fortuna kuda	1	Fortuna Kuda / -	2.529.500	Bagian P3ADK
159	AC	5	Sanyo / Sanyo	5.650.000	Bagian P3ADK
160	Access Point	2	TP-LINK WP851OU / -	399.000	Bagian P3ADK
161	Air Purifier (CHT)	2	Sharp FU-A28Y / -	1.275.000,55	Bagian P3ADK
162	Brankas	1	Ichiban / Ichiban	2.878.000	Bagian P3ADK
163	Camera foto digital	1	Kodak / C633	1.400.000	Bagian P3ADK
164	Digital Voice Recorder	1	Sony / ICD-PX312	1.103.009,20	Bagian P3ADK
165	External Hardisk	9	- / -	859.000	Bagian P3ADK
166	Faxsimile	2	Panasonic / -	2.125.000	Bagian P3ADK
167	Filling Besi	12	Brother / Brother	902.750	Bagian P3ADK
168	Kamera Foto Digital	3	Sony / DCS-W110	1.848.000	Bagian P3ADK
169	Kamera Video Digital	1	JVC / GZ MS100	3.535.000	Bagian P3ADK
170	Komputer PC	13	Dell / Optiplex 7040	7.010.906,19	Bagian P3ADK
171	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bagian P3ADK
172	Kursi Kerja	27	Indachi / D-570 TC	1.141.260,91	Bagian P3ADK
173	Kursi rapat	118	Futura / -	47.500	Bagian P3ADK
174	Kursi Tamu	5	Fortuna / Fortuna	1.500.000	Bagian P3ADK
175	Layar Projector Tripod 96	2	Tripod / Screen D-Light TSDL 1717L	927.172,06	Bagian P3ADK
176	LCD Projector	3	Epson / Projector (EB-X200)	5.344.003,30	Bagian P3ADK
177	Lemari Besi	7	Brother / -	775.000	Bagian P3ADK
178	Lemari kaca	3	- / -	675.000	Bagian P3ADK
179	Meja kerja	35	Orbitrend / OST 1080	1.167.312,52	Bagian P3ADK
180	Meja Knap	1	Handmade Jati Vinmelamin / -	488.900	Bagian P3ADK
181	Meja Kursi Tamu	2	Ligna Ivory /	5.568.030,61	Bagian P3ADK
182	Meja Rapat	33	UNO / UCT 1732	830.144,57	Bagian P3ADK
183	Mesin Ketik	2	Royal 775 / Royal 775	1.955.000	Bagian P3ADK
184	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bagian P3ADK
185	Minibus	1	Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New	151.947.983,4	Bagian P3ADK
186	Notebook	5	Lenovo / G430	7.422.000	Bagian P3ADK
187	Pesawat Telpon	1	GTC / GTC	120.000	Bagian P3ADK
188	Printer	9	Epson / Epson	6.332.000	Bagian P3ADK
189	Radio	1	Polytron / Polytron	320.000	Bagian P3ADK
190	RAK BESI SIKU	2	Brother / B-901	1.212.086,77	Bagian P3ADK
191	Rak Kayu	10	- / -	70.000	Bagian P3ADK
192	Rak Lemari	14	- / Handmade	10.140.000	Bagian P3ADK
193	Scanner	2	Canon / Canon	1.325.000	Bagian P3ADK
194	Sepeda Motor	4	Yamaha / Yupiter	11.580.000	Bagian P3ADK
195	SOUND SYSTEM	1	Ampli / BMB DA 1600 SE	5.812.270,3	Bagian P3ADK
196	Spd Onthel	1	Polygon / -	1.225.000	Bagian P3ADK
197	Station wagon/Minibus	1	Toyota / Kijang KF-70	122.350.000	Bagian P3ADK
198	Televisi	2	Sharp / 21DXS500	1.281.273,40	Bagian P3ADK
199	UPS	3	APC / BE525-AS	507.327,22	Bagian P3ADK
200	White Board	5	- / -	756.000	Bagian P3ADK

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Merk/Tipe	Harga Satuan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
201	AC 2 PK	22	Samsung / AR18HCFSTWKN	6.352.390,83	Bag. Dalbang & BLP
202	Air Purifier (CHT)	2	Sharp FU-A28Y / -	1.275.000,55	Bag. Dalbang & BLP
203	Alat Test Beton/Hammer Test Digital	1	Proceq Type N / -	52.803.906,04	Bag. Dalbang & BLP
204	Almari Besi 2 Pintu	19	Brother B-203 / -	1.681.936,97	Bag. Dalbang & BLP
205	Almari kayu	12	- / 90x50x180	10.000	Bag. Dalbang & BLP
206	Almari Rak	15	- / -	68.794.000	Bag. Dalbang & BLP
207	Almari Sorok	4	- / Almari Sorok Besar uk.160X40X200	760.000	Bag. Dalbang & BLP
208	Brankas	1	Sulinnget / Band Kas "Sulinnget"	800.000	Bag. Dalbang & BLP
209	CCTV	2	DVR Microvision DS 4104H / -	9.588.632,11	Bag. Dalbang & BLP
210	Concret hammer	1	Kamekura / -	20.070.000	Bag. Dalbang & BLP
211	External Hardisk	10	Seagate / -	600.000	Bag. Dalbang & BLP
212	Filling Cabinet	34	Brother / B-104	1.453.265,967	Bag. Dalbang & BLP
213	GPS	1	- / -	6.750.000	Bag. Dalbang & BLP
214	Handy Cam	1	JVC GR D650 / JVC GR D650	3.876.000	Bag. Dalbang & BLP
215	Handy Talky	1	Icom V68 / Icom V68	891.000	Bag. Dalbang & BLP
216	Kamera Digital	13	Canon 650 D / -	7.960.000	Bag. Dalbang & BLP
217	KOMPUTER PC	63	HP / EliteDesk 705 G2 SFF	8.863.665,03	Bag. Dalbang & BLP
218	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bag. Dalbang & BLP
219	Kursi Kerja	101	- / Kursi kayu/rotan	25.000	Bag. Dalbang & BLP
220	Kursi Rapat	165	Futura / Type FTR 501	233.510,21	Bag. Dalbang & BLP
221	Kursi Tunggu 4 Seat spon,	3	Yesnice / YW-204	1.491.700	Bag. Dalbang & BLP
222	Layar LCD	2	New Mark / -	694.300	Bag. Dalbang & BLP
223	LCD Proyektor	7	NEC / NP 305 / -	7.264.361,37	Bag. Dalbang & BLP
224	LED TV	11	LG 42LN 5400 / -	7.228.515,49	Bag. Dalbang & BLP
225	Meja kerja	79	Orbitrend / OST 1061	669.826,97	Bag. Dalbang & BLP
226	Meja Knap	13	Handmade Jati Fin Melamin / -	488.900	Bag. Dalbang & BLP
227	Meja Rapat	34	Handmade / -	950.000	Bag. Dalbang & BLP
228	MESIN GENZET 80 KVA	1	HARTECH / HT-80P Silent, ATS/AMF	312.161.412,3	Bag. Dalbang & BLP
229	Mesin Ketik	1	Royal / Mesin Ketik Longswagen 26	3.000.000	Bag. Dalbang & BLP
230	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bag. Dalbang & BLP
231	Meteran Digital	2	Krisbow / Caliper 0-8 KW 0600422	550.958,19	Bag. Dalbang & BLP
232	MONITOR LED 19	1	ViewSonic / VA1903a	1.303.479,85	Bag. Dalbang & BLP
233	NOTEBOOK	32	HP / 240 G5	9.313.665,03	Bag. Dalbang & BLP
234	Papan Pengumuman	1	- / -	9.442.859	Bag. Dalbang & BLP
235	Pesawat telephone	8	Panasonic / -	925.000	Bag. Dalbang & BLP
236	Peti Cash Kecil	1	- / Peti cash kecil	200.000	Bag. Dalbang & BLP
237	PRINTER INKJET	22	Epson / Printer (L310)	2.060.569,88	Bag. Dalbang & BLP
238	Radio tape	1	Polytron / -	1.000.000	Bag. Dalbang & BLP
239	SCANNER	7	BROTHER / Mobilke Color Document	2.210.658,49	Bag. Dalbang & BLP
240	Sepeda	1	Polygon / Sierra Alloy 2011 CTB	1.559.521,30	Bag. Dalbang & BLP
241	Sepeda Motor	4	Yamaha / Sepeda Motor Yamaha Jupiter	11.000.000	Bag. Dalbang & BLP
242	Sketmach Digital	3	Kriston KW 06-422 / -	575.000	Bag. Dalbang & BLP
243	Station Wagon	4	Mitsubishi / -	69.000.000	Bag. Dalbang & BLP
244	Tool kit Set	1	- / -	743.000	Bag. Dalbang & BLP
245	UPS	63	Libert / -	775.000	Bag. Dalbang & BLP
246	Web Camera	3	Logitec / Logitec	526.000	Bag. Dalbang & BLP
247	Whiteboard	13	Daiko / Whiteboard dua muka	800.000	Bag. Dalbang & BLP
248	Wireless	2	TOA G 800 / TOA G 800	4.385.000	Bag. Dalbang & BLP
249	Document Camera/ Visualizer	1	ELMO / MO-1	7.586.449,97	Bagian Protokol
250	Wireless Presentation System	1	WIPG / 1000	7.232.415,64	Bagian Protokol
251	AC 2 PK	31	Panasonic / PN 18 RKJ	7.310.150,24	Bagian Protokol
252	AIR PURIFIER	18	Blueair / Air Purifier Pro M Smokestop	9.325.988,73	Bagian Protokol
253	Alat Penghisap Asap Rokok	1	Sharp / -	4.950.000	Bagian Protokol
254	Brankas	2	INDACHI / 60A / -	900.000	Bagian Protokol
255	Buffet Kayu	3	- / -	5.161.919	Bagian Protokol
256	Clip On	3	TOA / ZM-360	141.263,78	Bagian Protokol
257	Digital Voice Recorder	1	Sony / ICD-UX533F	1.324.266,47	Bagian Protokol
258	FILLING CABINET	30	Brother / B-104	1.441.473,04	Bagian Protokol
259	Handy Talkie (HT) VHF	12	Icom / V80	1.881.872,32	Bagian Protokol
260	Hardisk Eksternal	1	Seagate / SRD 0 NS 1	636.000	Bagian Protokol
261	Jeep	2	Honda / CRV 2.0 - 2WD	274.400.000	Bagian Protokol
262	Kamera Foto Digital	7	SONY / DSC W730	1.715.345,92	Bagian Protokol
263	Kamera Video Digital	2	Sony HDR-CX220E / -	4.003.604,22	Bagian Protokol
264	Komputer PC	15	Dell / Optiplex 7040	7.010.906,19	Bagian Protokol
265	Komputer Tablet	9	Apple / iPad mini 64GB	10.416.519,24	Bagian Protokol
266	Kursi Kerja	61	- / -	150.000	Bagian Protokol
267	Kursi Kerja Wakil Walikota	1	Donati / ST-12	1.047.000	Bagian Protokol
268	Kursi Kerja Walikota	1	Donati / ST-12	1.700.000	Bagian Protokol
269	KURSI RAPAT	187	- / -	225.000	Bagian Protokol
270	Layar LCD	6	Brite / MAS 1818 manual pulldown	601.641,38	Bagian Protokol

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Merk/Tipe	Harga Satuan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6
271	LCD Projector	8	Sony / VPL-EX275	10.027.356,40	Bagian Protokol
272	Lemari Arsip	18	- / -	1.400.000	Bagian Protokol
273	Lemari Buku	5	- / -	600.000	Bagian Protokol
274	MEJA KERJA	58	- / -	75.000	Bagian Protokol
275	Meja Kerja Wakil Walikota	1	- / -	2.345.000	Bagian Protokol
276	Meja Kerja Walikota	1	- / -	2.345.000	Bagian Protokol
277	Meja Kursi Tamu	16	- / -	7.567.000	Bagian Protokol
278	Meja Makan	1	- / -	1.300.000	Bagian Protokol
279	MEJA OPERATOR	1	- / -	500.000	Bagian Protokol
280	Meja Rapat	46	- / -	100.000	Bagian Protokol
281	MEJA TELEPON	15	- / -	500.000	Bagian Protokol
282	Mesin Faximili	1	Panasonic, KX-FT983 / -	1.482.533,39	Bagian Protokol
283	Mesin Ketik Manual	4	Royal / 775	2.260.000	Bagian Protokol
284	Mesin Presensi	2	MBIO / 628	3.197.500	Bagian Protokol
285	NOTEBOOK	21	DELL / Inspiron 5458 (Core i5-5200U	8.733.491,66	Bagian Protokol
286	Printboard Elektronik + stand	4	Panasonic / UB5320	13.455.000	Bagian Protokol
287	Printer	26	hp / LaserJet 1010	1.750.000	Bagian Protokol
288	Radio Tape double cassette + CD	2	JVC / DX-J10	3.038.924,51	Bagian Protokol
289	Rak Buku	10	Cherry / RB930	529.000	Bagian Protokol
290	Scanner	6	Canon / -	1.250.000	Bagian Protokol
291	Sedan	2	Honda / All New Accord VTI-L Autom	544.468.852,6	Bagian Protokol
292	Sepeda	12	Polygon / Sierra Deluxe 3	3.996.148,87	Bagian Protokol
293	Sepeda Motor Roda 2	6	Honda / New Revo Spoke 110	11.754.598,99	Bagian Protokol
294	Speaker aktif	1	- / -	877.500	Bagian Protokol
295	Station Wagon	11	Toyota / Avanza Type G 1.3	134.850.000	Bagian Protokol
296	Telepon	26	Panasonic / KX-TG8102	903.298,71	Bagian Protokol
297	Televisi LCD	15	LG / 22LK230	1.505.927,28	Bagian Protokol
298	UPS	4	APC / BE525-AS	507.327,22	Bagian Protokol
299	White Board	14	- / -	25.000	Bagian Protokol
300	Wireless	14	TOA / WM-2100	300.000	Bagian Protokol
301	AC 2 PK	4	Samsung / AR18HCFSTWKN	6.352.390,83	Bagian Tapra
302	Almari Besi Lereg Kaca	7	Brother / B-304	2.004.504,78	Bagian Tapra
303	Brankas	2	Ichiban / -	710.000	Bagian Tapra
304	Filling Cabinet	17	TOP / FCT 4	1.487.201,91	Bagian Tapra
305	Global Positioning System	1	- / -	7.500.000	Bagian Tapra
306	Handphone	1	Nokia / E63	3.850.000	Bagian Tapra
307	HARDDISK EXTERNAL	8	- / -	1.000.000	Bagian Tapra
308	Kamera Foto digital	1	Nikon / Coolpix S3700 - Black	1.525.872,11	Bagian Tapra
309	Komputer PC	11	Dell / Optiplex 7040	7.010.906,19	Bagian Tapra
310	Komputer Tablet	1	Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso	3.806.035,88	Bagian Tapra
311	Kursi Kerja	29	- / Meubelair	3.900	Bagian Tapra
312	KURSI RAPAT	55	Futura / FTR 501	253.954,07	Bagian Tapra
313	LCD Projector	3	Epson / -	7.290.000	Bagian Tapra
314	Lemari Kayu	4	- / -	135.000	Bagian Tapra
315	MEJA KERJA	46	Orbitrend / -	783.700,18	Bagian Tapra
316	MEJA KURSI TAMU	4	Fortuna / Kyoto 3.1.1	5.506.875,24	Bagian Tapra
317	Meja rapat	7	Victor / -	655.150	Bagian Tapra
318	Mesin Ketik Manual	3	Ollivety / Mesin Ketik Standar	700.000	Bagian Tapra
319	Mesin presensi sidik jari	1	Solution / X 601	3.968.277,68	Bagian Tapra
320	NOTEBOOK	6	DELL / Inspiron 5458 (Core i5-5200U	8.733.491,66	Bagian Tapra
321	Pesawat Telepone	4	Panasonic / Alat Komunikasi	860.000	Bagian Tapra
322	PRINTER LASERJET	8	HP / LaserJet Pro M201n (CF455A)	2.936.086,75	Bagian Tapra
323	Rak Besi	7	Boss / Loker	140.000	Bagian Tapra
324	Sepeda	5	Polygon / Sierra Lite	1.756.610,23	Bagian Tapra
325	Sepeda Motor	4	Honda / Revo Spoke 110	11.420.692,63	Bagian Tapra
326	Station Wagon	3	Suzuki / Carry Futura ST.160	60.000.000	Bagian Tapra
327	UPS 750VA (450W)	2	- / -	4.495.002,44	Bagian Tapra
328	White board	3	Daiko / -	771.395	Bagian Tapra

2.2.3 Teknologi Informasi

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. SIM Agenda Rapat yang diampu Bagian Umum;
2. SIM Penerimaan Tamu yang diampu Bagian Protokol;
3. SIM Pelaporan yang diampu Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
4. SIM e-LAKIP yang diampu Bagian Organisasi;
5. SIM Organisasi yang diampu Bagian Organisasi; dan
6. SIM BLUD yang diampu Bagian P3ADK.

Sementara Bagian Hukum membuat website: hukum.jogjakota.go.id yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN). JDIHN memudahkan dalam mencari aturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta periode Renstra Sekretariat Daerah 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan 2.9.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun										Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1 BAGIAN PROTOKOL																								
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	II Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	III Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	IV Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	79%	82%	85%	89%	93%	89%	93%	86%	76%	105%	86%	92%	89%	96,81%	127,51%	100,94%	103,28%	95,66%					
2 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN																								
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%				
	IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%				
3 BAGIAN HUKUM																								
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	IV Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	V Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4 BAGIAN P3ADK																								
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun										Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun										
		Target NSPK		Target IKK		Target Indikator Lainnya		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016					
IV	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi 1. Terlaksananya penyusunan bahan pendukung kebijakan pengembangan iklim investasi Terlaksananya penyusunan data potensi investasi Terlaksananya kegiatan promosi potensi investasi dan informasi pelayanan penanaman modal Kota Yogyakarta Terlaksananya Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAP) di Lokasi Strategis Beriklim di Kota Yogyakarta (Wilayah Kec. Jetis, Gedontengen, Gondokusuman, Pakualaman, dan Gondokusuman) Kajian/pendukung kebijakan pengembangan iklim investasi pelayanan informasi penanaman modal kota yogyakarta Update data penanaman modal Koordinasi pengembangan investasi daerah Pengelolaan sub domain website investasi Informasi peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan Updating website investasi Buku peluang investasi dan profil ekonomi Bahan promosi potensi daerah																										
		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
V	Program Pengembangan Kerjasama Daerah Kejadian Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah Terlaksananya kajian kerjasama dengan lembaga non pemerintah Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga non pemerintah Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah Terlaksananya pembuatan dan pencatatan penjaminan, dan penyusunan perwal naskah hibah Terlaksananya pembuatan pencatatan perjanjian di Notaris Kejadian Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Terlaksananya kajian kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri																										
		5 kajian	10 kajian/ telaah	2 penawaran	20 perikatan	5 dokumen,	1 perwal	5 dokumen																			
		2 penawaran	20 perikatan	10 perikatan	5 dokumen,	1 perwal	5 dokumen																				
		10 perikatan	20 perikatan	20 perikatan	5 dokumen,	1 perwal	5 dokumen																				
		5 dokumen,	1 perwal	5 dokumen																							
		1 perwal	5 dokumen																								
		5 kajian																									
		2 penawaran																									
		4 perikatan																									
		1 perwal																									

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	Target NSPK															
	Target IKK															
	Target Indikator Lainnya															
	Terlaksananya koordinasi hubungan dengan lembaga dalam negeri (APEKSI) dan lembaga luar negeri (UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 koordinasi					15 koordinasi									
	Jumlah kajian/ telaah rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau luar negeri.	10 kajian/ telaah						56 kajian/ telaah								
	Penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintahan dalam negeri atau lembaga luar negeri.	2 penawaran						3 penawaran								
	Jumlah perkaitan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri.	20 perkaitan						31 perkaitan								
	Frekuensi koordinasi hubungan dengan lembaga dalam negeri (APEKSI) dan lembaga luar negeri (UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	100%					100%									
	Terlaksananya uran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynett, Forsesiasi	100%					83,26%									
3.	Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah															
	Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah	2 pemeliharaan					2 pemeliharaan									
	Terlaksananya updating database kerjasama daerah	4 updating					5 updating									
	Terlaksananya updating sub domain kerjasama.logjakota.go.id	24 updating					20 updating									
	Terlaksananya audit objek kerjasama daerah	1 audit					1 audit									
	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun	1 dokumen					1 dokumen									
	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan	1 dokumen					1 dokumen									
	Updating sistem informasi perjanjian	24 update					24 update									
	Dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya	1 dokumen					1 dokumen									
	Updating sub domain kerjasama.logjakota.go.id	24 update					24 update									
	Dokumen hasil audit obyek kerjasama	1 dokumen					1 dokumen									
	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun	1 dokumen					1 dokumen									
	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan	1 dokumen					1 dokumen									
	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi perjanjian	100%					100%									
	Terlaksananya dokumentasi naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya	100%					100%									
	Terlaksananya pengelolaan sub domain kerjasama.logjakota.go.id	100%					100%									
4.	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah															
	Terlaksananya kajian/ telaah rencana kerjasama daerah	20 kajian/ telaah					64 kajian/ telaah									
	Terlaksananya penawaran kerjasama daerah	4 penawaran					3 penawaran									
	Terlaksananya perkaitan kerjasama daerah	40 perkaitan					84 perkaitan									
	Terlaksananya pembuatan / pencatatan perjanjian di notaris	10 dokumen					17 dokumen									

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun										Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun						
		Target NSPK		Target IKK		Target Indikator Lainnya		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
2.	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Terlaksananya penyusunan data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD Terlaksananya penyusunan kajian peningkatan optimalisasi pemanfaatan barang/ aset daerah, BLUD dan BUMD Terlaksananya perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD sebagai bahan pendukung kebijakan						1 database					1 database											
							2 kajian					3 kajian											
							2 dokumen, draft penval					3 dokumen											
							1 dokumen					2 draft perval											
	Evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD						1 database					1 database											
	Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD						1,1 dokumen, draft penval					3 dokumen											
	Evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD						1 dokumen					6 draft perval											
	Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah						2 rencana target					2 rencana target											
	Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset, BLUD dan BUMD						2 raperwal/ raperda					4 raperwal/ raperda											
	Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD						1 dokumen					1 dokumen											
	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD, dan BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD						1 database					1 database											
	Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD						1 dokumen					1 dokumen											
	Evaluasi dan Monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD						2 rencana target					1 dokumen											
	Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah						2 rencana target					2 rencana target											
	Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset dan BLUD						2 raperwal/ raperda					2 raperwal/ raperda											
	Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD						1 dokumen					1 dokumen											
	Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset dan BLUD						2 raperwal/ raperda					2 raperwal/ raperda											
	Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD						1 dokumen					1 dokumen											
	Data optimalisasi BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Bahan pendukung kebijakan optimalisasi BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Evaluasi dan Monitoring optimalisasi Pendapatan BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Rancangan kebijakan mengenai BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
	Kajian optimalisasi BUMD						1 dokumen					1 dokumen											
5	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																						
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%					100%											
							100%					100%											
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan						100%					100%											
							100%					100%											

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
 Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan				
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	2016	Anggaran	Realisasi			
I BAGIAN HUKUM																							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.222.080	534.212.175	505.508.000	543.133.740	627.071.137		337.178.880	458.487.806	456.818.895	517.472.920	591.278.775		83,00%	85,83%	90,37%	95,28%	94,29%				13,59%	18,84%	
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	27.407.000	38.367.500	32.082.000	66.750.000	52.300.000		22.687.350	21.582.914	25.696.635	44.019.468	37.500.588		82,78%	56,25%	80,10%	65,95%	71,70%				22,71%	16,32%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000	8.000.000	20.000.000	36.000.000	27.000.000		11.900.000	7.000.000	20.000.000	36.000.000	25.250.000		74,38%	87,50%	100%	100%	93,52%				17,19%	28,05%	
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	9.250.000	14.913.000		-	-	-	9.050.000	13.070.980		-	-	-	97,84%	87,65%					61,22%	44,43%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	2.785.808.000	3.592.777.764	2.528.883.400	3.144.112.541	3.913.691.473		2.503.829.550	2.721.458.189	2.289.526.310	2.804.356.617	3.495.314.925		89,88%	75,75%	90,54%	89,19%	89,31%				10,12%	9,90%	
1 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	865.025.000	1.201.890.000	659.100.000	1.337.375.000	1.643.190.000		687.252.200	531.089.675	588.829.185	1.184.235.135	1.389.819.105		79,45%	44,19%	89,34%	88,55%	84,58%				22,49%	25,56%	
2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa	1.195.100.000	1.154.515.000	744.350.000	912.875.000	1.122.801.000		1.141.350.000	1.097.932.000	681.432.000	808.796.000	1.008.333.000		95,50%	95,10%	91,55%	88,60%	89,81%				-1,51%	-2,91%	
3 Pembuatan dan Penerbitan Lembangan Daerah	186.858.000	434.879.964	377.600.000	405.987.541	434.154.473		161.532.500	400.904.714	350.609.725	385.494.882	422.289.820		86,45%	92,19%	92,85%	94,95%	97,27%				33,09%	40,36%	
4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah	249.990.000	370.227.800	516.788.400	229.293.000	181.850.000		244.580.000	336.600.800	484.062.400	183.790.600	164.968.000		97,84%	90,92%	93,67%	80,16%	90,72%				-6,81%	-8,14%	
5 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	57.975.000	62.825.000	72.120.000	95.982.000	142.746.000		48.145.000	60.651.000	60.668.000	80.440.000	126.455.000		83,04%	96,54%	84,12%	83,81%	88,59%				36,55%	40,66%	
6 Publikasi Raperda ke Media Cetak	230.860.000	368.440.000	158.925.000	162.600.000	388.950.000		220.969.850	294.280.000	123.925.000	161.600.000	383.450.000		95,72%	79,87%	77,98%	99,38%	98,59%				17,12%	18,38%	
II BAGIAN P3ADK																							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	438.210.000	558.328.750	528.052.000	666.596.960	731.059.700		347.641.395	481.078.990	324.903.289	490.579.743	673.914.176		79,33%	86,16%	61,53%	73,59%	92,18%				16,71%	23,46%	
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	32.031.250	32.540.250	33.927.000	101.939.000	97.184.000		16.586.283	19.412.097	20.632.683	72.723.756	76.712.754		51,78%	59,66%	60,81%	71,34%	78,94%				50,85%	90,63%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	15.000.000		11.000.000	8.350.000	35.480.000	25.168.000	7.100.000		61,11%	33,40%	88,70%	62,92%	47,33%				-4,17%	-8,86%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	2.150.000	15.950.000	12.246.000		-	-	2.150.000	15.950.000	9.000.000		-	-	100%	100%	73,49%				235%	159%	
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	260.512.000	214.578.000	294.545.000	473.245.190	429.635.780		236.959.350	203.439.014	278.903.900	449.507.489	388.700.565		90,96%	94,81%	94,69%	94,98%	90,47%				16,23%	16,01%	
1. Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi	260.512.000	214.578.000	294.545.000	473.245.190	429.635.780		236.959.350	203.439.014	278.903.900	449.507.489	388.700.565		90,96%	94,81%	94,69%	94,98%	90,47%				16,23%	16,01%	

Uraian	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
	1.259.754.000	1.205.824.000	896.825.000	926.850.000	990.362.000	1.208.230.450	1.113.464.600	843.266.800	900.649.500	951.438.675	95,91%	92,34%	94,03%	97,17%	96,07%	-5,35%	-5,31%						
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	1.077.325.000	1.059.767.000	710.515.000	670.410.000	540.366.000	1.038.865.100	982.932.200	674.815.000	661.083.000	524.315.900	96,43%	92,75%	94,98%	98,61%	97,03%	-12,46%	-12,38%						
1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	182.429.000	146.067.000	186.310.000	256.440.000	247.876.000	169.365.350	130.532.400	168.451.800	239.566.500	237.680.675	92,84%	89,37%	90,41%	93,42%	95,89%	8,97%	10,08%						
2 Kegiatan Peningkatan Pemantauan dan Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	-	202.120.000	-	-	-	-	189.442.100	-	-	-	-	93,73%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Kegiatan Pembinaan BUMD	383.940.000	404.193.000	425.760.000	503.090.000	485.485.000	323.650.650	312.529.050	325.851.917	432.418.839	417.193.805	84,30%	77,32%	76,53%	85,95%	85,93%	6,61%	7,23%						
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	88.700.000	65.746.000	-	-	-	72.758.200	49.893.500	-	-	-	82,03%	75,89%	-	-	-	-25,88%	-31,43%						
1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan lembaga non pemerintah	87.120.000	192.581.000	-	-	-	49.789.950	129.863.650	-	-	-	57,15%	67,43%	-	-	-	121,05%	160,82%						
2 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah	208.120.000	145.866.000	153.680.000	185.425.000	201.625.000	201.102.500	132.771.900	122.458.700	172.348.100	190.366.950	96,63%	91,02%	79,68%	92,95%	94,42%	-0,78%	-1,33%						
3 Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	-	-	272.080.000	317.665.000	283.860.000	-	-	203.393.217	260.070.739	226.826.855	-	-	74,75%	81,87%	79,91%	2,16%	5,76%						
4 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III BAGIAN PROTOKOL	1.062.240.250	1.128.493.505	1.257.519.200	1.443.220.330	1.404.203.159	860.612.432	1.098.430.887	1.090.673.189	1.373.487.415	1.337.542.608	81,02%	97,34%	86,73%	95,17%	95,25%	8,05%	13,85%						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.018.750	214.544.215	320.478.000	302.940.000	309.359.250	184.129.570	203.777.936	167.588.329	183.917.769	197.307.194	80,75%	94,98%	52,29%	60,71%	63,78%	8,92%	1,79%						
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	-	-	2.820.000	10.500.000	8.370.000	-	-	2.820.000	9.450.000	8.332.500	-	-	100%	90,00%	99,55%	98,40%	97,74%						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.493.822.750	1.837.882.058	2.069.839.200	1.834.840.147	1.699.090.885	1.389.861.500	1.890.117.433	1.719.472.138	1.663.728.256	1.531.446.623	93,04%	103%	83,07%	90,67%	90,13%	3,44%	2,55%						
Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	104.661.750	286.893.436	147.999.600	141.472.804	147.244.560	104.641.750	286.893.436	113.783.600	127.158.804	110.453.415	99,98%	100,00%	76,88%	89,88%	75,01%	10,17%	1,39%						
1. Fasilitas Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah	1.179.455.000	1.024.839.673	1.338.710.800	1.240.417.737	1.124.557.930	1.113.203.350	1.087.395.348	1.124.833.780	1.156.664.813	1.060.574.914	94,38%	106,10%	84,02%	93,25%	94,31%	-1,16%	-1,18%						
2. Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	41.225.000	40.426.575	51.750.000	63.260.000	71.240.000	37.780.400	40.426.575	51.723.000	63.237.800	66.916.700	91,64%	100,00%	99,95%	99,96%	93,93%	18,20%	19,28%						
3. Pembuatan Naskah Sambutan	168.480.000	485.722.374	531.378.800	389.689.606	356.048.395	134.236.000	475.402.074	429.131.758	316.666.839	293.501.594	79,67%	97,88%	80,76%	81,26%	82,43%	27,83%	29,66%						
4. Fasilitas Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV BAGIAN UMUM	429.646.070	650.785.319	547.229.550	603.001.718	500.112.950	374.284.520	550.109.144	432.532.760	548.833.509	474.361.117	87,11%	84,53%	79,04%	91,02%	94,85%	4,10%	6,68%						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.629.750	398.068.250	292.624.000	489.179.793	328.287.000	119.100.004	325.899.179	199.098.467	425.006.297	269.101.196	71,05%	81,87%	68,04%	86,88%	81,97%	23,96%	31,49%						
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	47.432.000	50.072.000	97.504.000	57.890.000	41.514.000	46.649.000	45.912.000	66.235.515	53.370.265	36.400.260	98,35%	91,69%	67,93%	92,19%	87,68%	-3,12%	-5,49%						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2016	Anggaran	Realisasi	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahantagaan	1.070.010.700	1.037.892.250	1.454.761.451	1.856.893.716	2.197.937.153	1.015.939.525	857.910.782	1.352.724.522	1.829.623.564	2.064.643.693	94,95%	82,66%	92,99%	98,53%	93,94%	94,95%	26,35%		25,81%	
1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah	669.599.500	639.170.250	713.077.851	817.470.500	-	655.368.150	491.558.782	676.085.447	796.145.729	-	97,87%	76,91%	94,81%	97,39%	-	97,87%	7,36%		7,16%	
2 Pelayanan Kerumahantagaan	400.411.200	398.722.000	741.683.600	1.039.423.216	1.335.773.153	360.571.375	366.352.000	676.639.075	1.033.477.835	1.259.825.054	90,05%	91,88%	91,23%	99,43%	94,31%	90,05%	58,40%		62,35%	
3 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	561.645.000	-	-	-	-	529.536.182	-	-	-	-	94,28%	-	-	-	-	-
4 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	-	-	-	-	22.547.000	-	-	-	-	22.538.840	-	-	-	-	99,96%	-	-	-	-	-
5 Penatalaksanaan Persandian	-	-	-	-	277.972.000	-	-	-	-	252.743.617	-	-	-	-	90,92%	-	-	-	-	-
V BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN																				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	410.043.857	519.599.008	386.578.025	380.245.970	493.587.930	364.369.115	447.181.373	344.422.925	353.312.562	417.860.602	88,86%	86,06%	89,10%	92,92%	84,66%	88,86%	5,09%		3,67%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.762.500	93.997.000	137.032.000	282.389.200	254.609.000	41.414.878	71.176.258	119.653.306	252.489.901	205.441.261	80,01%	75,72%	87,32%	89,41%	80,69%	80,01%	97,97%		99,01%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	12.000.000	-	34.000.000	-	-	2.500.000	-	31.920.000	-	-	20,83%	-	93,88%	-	183%			1177%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	23.704.600	28.511.902	34.024.465	-	-	23.704.600	28.497.835	28.108.420	-	-	100%	99,95%	82,61%	-	21,77%		9,29%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	830.403.840	1.061.993.428	976.865.050	901.982.387	1.062.320.558	716.383.305	982.999.778	866.895.155	777.188.180	856.695.117	86,27%	92,56%	88,74%	86,16%	80,64%	86,27%	6,98%		4,90%	
1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Kegiatan	58.885.000	107.609.000	105.247.850	109.996.050	203.553.000	52.910.000	98.679.000	95.343.530	88.745.360	148.644.160	89,85%	91,70%	90,59%	80,68%	73,02%	89,85%	61,42%		45,23%	
2. Kegiatan Penilaian dan Fasilitas Penyedia Barang dan Jasa	207.595.000	182.851.000	117.320.000	203.948.000	-	152.870.000	154.487.500	99.648.000	162.792.480	-	73,64%	84,49%	84,94%	79,82%	-	73,64%	-0,59%		2,16%	
3. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	270.045.000	375.031.500	275.391.000	299.662.000	330.428.500	250.449.125	365.878.750	264.047.275	265.669.350	293.297.640	92,74%	97,56%	95,88%	88,65%	88,76%	92,74%	5,59%		4,28%	
4. Kegiatan Pengendalian Operasional	293.878.840	396.501.928	478.906.200	288.376.337	323.450.058	260.154.180	363.954.528	407.856.350	259.991.990	269.770.712	88,52%	91,79%	85,16%	90,16%	83,40%	88,52%	2,52%		0,92%	
5. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	204.889.000	-	-	-	-	144.982.605	-	-	-	-	70,76%	-	-	-		-
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.251.572.340	1.195.921.428	863.993.850	1.354.786.187	2.294.460.688	1.007.390.015	1.054.350.251	767.503.545	1.100.136.751	1.870.888.283	80,49%	88,16%	88,83%	81,20%	81,54%	80,49%	20,83%		21,43%	
1. Kegiatan Operasional LPSE	348.593.840	315.707.928	277.276.600	356.870.137	-	332.380.665	298.210.608	229.861.135	333.747.796	-	95,35%	94,46%	82,90%	93,52%	-	95,35%	0,79%		0,14%	
2. Kegiatan Operasional ULP	902.978.500	880.213.500	586.717.250	997.916.050	-	675.009.350	756.139.643	537.642.410	766.388.955	-	74,75%	85,90%	91,64%	76,80%	-	74,75%	3,50%		4,51%	
3. Kegiatan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	-	-	-	-	112.639.950	-	-	-	-	86.241.328	-	-	-	-	76,56%	-	-	-		-
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	1.246.875.958	-	-	-	-	1.035.956.861	-	-	-	-	83,08%	-	-	-		-
5. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	-	-	-	-	370.419.950	-	-	-	-	273.239.281	-	-	-	-	73,76%	-	-	-		-
6. Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	141.546.950	-	-	-	-	97.944.090	-	-	-	-	69,09%	-	-	-		-
7. Kegiatan pelaksanaan aplikasi pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	422.977.880	-	-	-	-	377.656.723	-	-	-	-	89,29%	-	-	-		-

Uraian	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
	182.242.360	972.305.922	341.914.300	885.561.816	485.314.746	145.826.385	695.130.011	295.280.890	659.716.688	407.337.847	80,0%	71,5%	86,4%	74,5%	83,9%							
VI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.378.500	12.067.081	40.947.500	59.432.000	53.848.000	12.557.266	12.067.081	13.776.839	19.449.200	58,7%	100	33,6%	36,8%	36,1%								
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	-	-	12.340.000	24.925.000	10.545.000	-	-	9.704.200	23.774.750	8.097.500	-	-	78,6%	95,4%	76,8%							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	10.254.768.000	30.710.300.000	9.964.518.500	12.441.288.496	15.391.293.930	1.681.086.125	26.081.013.450	5.132.935.980	10.453.657.497	16%	85%	52%	84%	95%								
1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik	9.828.751.000	30.517.785.000	9.607.866.000	12.110.633.748	15.034.650.000	1.395.633.250	25.974.385.450	4.794.943.650	10.200.436.400	14%	85%	50%	84%	95%								
2 Penyelesaian masalah pertanahan, pelebaran dan pensertifikatan tanah	426.017.000	192.515.000	356.652.500	330.654.748	356.643.930	285.452.875	106.628.000	337.992.330	253.221.097	67%	55%	95%	77%	69%								
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.728.262.750	1.785.289.625	1.805.532.950	1.674.204.196	2.012.619.810	1.337.121.150	1.443.676.525	1.338.896.498	1.382.324.949.50	77%	81%	74%	83%	77%								
1 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	232.134.000	231.471.500	302.740.000	310.120.574	326.931.715	158.446.925	166.074.150	248.896.298	205.007.819	67%	72%	82%	66%	59%								
2 Penyusunan Penetapan Kinerja, RKT dan Rakorperm.	473.026.125	73.683.000	72.023.000	104.139.250	116.073.250	363.584.525	60.496.875	48.889.900	85.330.350	77%	82%	68%	82%	165%								
3 Penyusunan LKPPJ 2011-2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja	132.585.000	83.770.000	103.039.900	100.174.500	57.045.000	83.259.500	49.691.500	57.042.700	77.572.750	63%	59%	55%	77%	69%								
4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan	191.988.500	153.902.500	161.980.500	186.521.000	-	185.252.725	130.495.375	133.075.650	167.477.000	96%	85%	82%	90%	-								
5 Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah Walikota kepada Camat	-	-	-	-	135.035.000	-	-	-	-	124.091.600	-	-	-	-	92%							
7 Fasilitas Pemiliu	439.866.625	96.240.500	35.987.500	39.940.750	38.074.000	340.968.600	53.872.875	30.784.550	29.694.650	78%	56%	86%	74%	97%								
8 Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan	169.417.500	-	175.394.500	-	-	153.299.750	-	99.162.950	-	90%	0%	57%	-	-								
9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	-	239.276.000	-	131.813.374	188.373.965	-	199.900.000	-	104.514.288.50	-	84%	-	79%	92%								
10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	98.670.000	145.039.950	130.300.000	173.760.000	-	62.733.000	84.852.900	106.162.325	-	64%	59%	81%	84%								
11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	89.245.000	808.276.125	715.117.600	671.194.748	390.773.880	54.309.125	720.412.750	563.126.850	606.565.787	61%	89%	79%	90%	79%								
12 Penyusunan LAKIP dan LPPD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
13 Penyusunan LPPD dan ILPPD TA. 2012-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
14 Pendukung Pelaksanaan Pilkada	-	-	-	-	401.613.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
15 Penyusunan LKPPJ dan LPPD AMJ Walikota Yk	-	-	-	-	184.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	2.104.275.100	84.678.750	55.010.000	1.815.770.000	26.774.000	1.966.566.725	55.771.000	54.220.400	1.131.446.850	93%	66%	99%	62%	40%								
1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	2.104.275.100	84.678.750	55.010.000	1.815.770.000	26.774.000	1.966.566.725	55.771.000	54.220.400	1.131.446.850	93%	66%	99%	62%	40%								

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
VII BAGIAN ORGANISASI																							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	356.887.425	436.818.542	449.257.325	437.865.653	412.520.450	334.475.910	383.942.685	393.229.711	416.478.077	396.443.555	93,72%	87,90%	87,53%	95,12%	96,10%	87,90%	87,53%	87,53%	95,12%	96,10%	3,90%	4,63%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.191.500	42.359.000	39.224.000	101.809.000	73.290.000	22.905.950	33.984.547	31.227.100	85.964.050	58.984.150	58,45%	80,23%	79,61%	84,44%	80,48%	80,23%	79,61%	79,61%	84,44%	80,48%	21,75%	39,38%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000	21.000.000	25.500.000	27.000.000	13.500.000	21.000.000	19.750.000	7.500.000	26.500.000	2.750.000	100%	94,05%	29,41%	98,15%	20,37%	94,05%	29,41%	29,41%	98,15%	20,37%	-8,99%	-21,73%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.100.000	3.090.000	10.140.000	17.910.000	9.656.000	3.878.000	3.090.000	10.055.000	16.800.805	9.045.310	94,59%	100,00%	99,16%	93,81%	93,68%	100,00%	99,16%	99,16%	93,81%	93,68%	33,88%	33,31%	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.391.314.600	1.664.662.000	1.801.503.625	2.130.203.200	3.086.700.850	1.215.616.935	1.481.838.175	1.642.123.595	1.987.283.994	2.743.093.899	87,37%	89,02%	91,15%	93,29%	88,87%	89,02%	91,15%	91,15%	93,29%	88,87%	30,46%	31,41%	
1 Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan beban kerja	391.333.750	355.591.750	325.429.750	-	-	349.395.050	282.766.100	299.903.860	-	-	89,28%	79,52%	92,16%	-	-	89,28%	79,52%	92,16%	-	-	-8,42%	-7,08%	
2 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	228.535.000	278.020.000	419.953.625	490.545.000	493.414.500	200.747.750	254.642.625	377.528.135	452.983.434	433.970.950	87,84%	91,59%	89,90%	92,34%	87,95%	87,84%	91,59%	89,90%	92,34%	87,95%	28,98%	29,04%	
3 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	163.481.250	322.200.000	226.480.000	232.018.000	-	159.465.700	319.370.250	218.765.400	227.053.000	-	97,54%	99,12%	96,59%	97,86%	-	97,54%	99,12%	96,59%	97,86%	-	13,97%	14,13%	
4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	462.024.600	510.325.000	610.223.750	789.812.700	994.270.900	378.039.280	452.440.050	554.206.645	755.874.060	870.805.453	81,82%	88,66%	90,82%	95,70%	87,58%	81,82%	88,66%	90,82%	95,70%	87,58%	28,80%	32,59%	
5 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	145.940.000	198.525.250	219.416.500	215.986.500	188.881.000	127.969.155	172.619.150	191.719.555	180.312.390	146.307.100	87,69%	86,95%	87,38%	83,48%	77,46%	87,69%	86,95%	87,38%	83,48%	77,46%	7,36%	3,58%	
6 Pelaksanaan Analisa Jabatan	-	-	-	401.841.000	292.442.500	-	-	-	371.061.110	262.791.210	-	-	-	-	89,86%	-	-	-	-	92,34%	89,86%	-27,22%	-29,18%
7 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	228.480.000	-	-	-	-	225.192.000	-	-	-	-	98,56%	-	-	-	-	-	98,56%	-	-
8 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan	-	-	-	-	217.423.000	-	-	-	-	182.221.000	-	-	-	-	83,81%	-	-	-	-	-	83,81%	-	-
9 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	254.374.000	-	-	-	-	210.871.000	-	-	-	-	82,90%	-	-	-	-	-	82,90%	-	-
10 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	-	-	-	-	417.414.950	-	-	-	-	410.935.186	-	-	-	-	98,45%	-	-	-	-	-	98,45%	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam analisis SWOT tantangan (*Threat*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan peluang (*Opportunity*) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari delapan Unit Kerja. Masing-masing Unit Kerja memiliki tugas pokok yang berbeda-beda. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan. Bagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah Asisten dan Staf Ahli. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (P3ADK) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama. Dalam melaksanakan ketugasan Bagian P3ADK sangat berkaitan dengan Perangkat Daerah lain, baik dalam bidang perekonomian, pengembangan PAD, pembinaan BUMD dan BLUD, dan kerjasama. Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang tata usaha, bidang keuangan sekretariat daerah, serta bidang rumah tangga. Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi/pelayanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana kurang memadai;
3. Peraturan yang tumpang tindih;
4. Dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas pengendalian maka tantangannya adalah PPTK di lingkungan Kota Yogyakarta masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan;
5. Dalam lingkup birokrasi tantangannya adalah:
 - a. Peningkatan kualitas birokrasi;
 - b. Reformasi birokrasi;
 - c. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Dalam lingkup pelelangan tantangannya adalah:
 - a. Dokumen perencanaan tidak tepat waktu;
 - b. Proses pelelangan tidak tepat waktu;
 - c. Fluktuasi harga.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:

1. Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan membangun SIM;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat;
4. Pelaksanaan Otonomi daerah;
5. Adanya diklat peningkatan kualitas SDM;
6. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;
7. Penerapan *Center of Excellent* (COE) dalam pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna layanan;
8. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3. Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota	PP 18 Tahun 2016 RPJMD Kota Yogyakarta	Proses diskusi penataan kelembagaan yang terlalu singkat	RPJMD Kota Yogyakarta belum ada untuk periode 2017-2022 dan masih berupa rancangan	Proses penataan kelembagaan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 belum ada RPJMD-nya karena proses pemilihan walikota-wakil walikota
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi

1	2	3	4	5	6
5. Kualitas layanan keprotokolannya	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolannya	Pelayanan kedinasan dan keprotokolannya yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolannya, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolannya	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolannya
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai
		PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan		

1	2	3	4	5	6
8. Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY	Pathok dan papan batas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman telah terpasang, namun masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul provinsi DIY Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman provinsi DIY	Kegiatan Sosialisasi dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman	Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
10. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan	Ketidajelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi

1	2	3	4	5	6
		Pendirian Rumah Ibadat • UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara an Ibadah Haji			

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, visi Walikota Yogyakarta adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah misi ketujuh. Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Walikota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			

1	2	3	4	5
1.	Program: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah - Konsep tunjangan kinerja	Kesenjangan tambahan penghasilan antar jabatan sehingga diperlukan tunjangan kinerja	Tahun 2017 baru proses kajian dengan P2EB UGM Belum ada metode baku Hasil evaluasi jabatan pemkot dalam proses validasi	Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan persetujuan DPRD Ps 63 (2) PP No. 58 Tahun 2005 TPP yang ada belum berdasarkan kinerja sehingga Rekomendasi dewan pada LKPJ Walikota Tahun 2016 untuk penerapan Tunjangan Kinerja paling lambat tahun 2018
	- Peningkatan kualitas pelayanan publik	Terhambatnya alih pengetahuan kepada Perangkat Daerah / unit kerja penyelenggara pelayanan publik	Standar dan prosedur kerja yang tidak memadai Sistem, prosedur dan hubungan kerja belum memadai Regulasi dari pusat yang berubah-ubah Rotasi pegawai di Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik	Kapabilitas SDM yang mumpuni Komitmen yang tinggi dari Bagian Organisasi

1	2	3	4	5
2.	Program: Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berjalan baik
			Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan	
		Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.	Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	
		Belum adanya kajian standar pelimpahan kewenangan dan kurangnya personil di Kecamatan	Ketersediaan Personil dan sarana prasarana serta anggaran di Kecamatan	
		Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	
			Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	

1	2	3	4	5
		Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%

1	2	3		4	5
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah

1	2	3		4	5
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kemendagri yang sejalan dengan ketugasan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu;
2. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah Perda bermasalah;
4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaah RTRW

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

RTRW Kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan RTRW Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan,

pariwisata, pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri

dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaan parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

RTRW Kota Yogyakarta meliputi rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah. Struktur ruang Kota Yogyakarta adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang meliputi:

1. sistem perkotaan;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
6. sistem jaringan penerangan jalan.

Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang meliputi:

1. kawasan lindung daerah; dan
2. kawasan budidaya daerah.

Tabel 3.4
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda
1	Sistem perkotaan	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Sistem jaringan transportasi	Tidak ada keterkaitan langsung
3	Sistem jaringan energi	Tidak ada keterkaitan langsung
4	Sistem jaringan telekomunikasi	Tidak ada keterkaitan langsung
5	Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Tidak ada keterkaitan langsung
6	Sistem jaringan penerangan jalan	Tidak ada keterkaitan langsung

Tabel 3.5
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

No.	Rencana Pola Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda
1	Kawasan lindung daerah	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Kawasan budidaya daerah	Tidak ada keterkaitan langsung

3.4.2 Telaah KLHS

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, di sisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air di sini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.6
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No.	Aspek Kajian	Implikasi Terhadap Pelayanan Setda
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Tidak ada keterkaitan langsung
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Tidak ada keterkaitan langsung
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Tidak ada keterkaitan langsung
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tidak ada keterkaitan langsung
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Tidak ada keterkaitan langsung

Berdasarkan hasil analisis KLHS, telaah rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang wilayah di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tidak ada keterkaitan langsung terhadap RTRW Kota Yogyakarta maupun KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan *supporting* data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2	Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	2,12%	2,08%
			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	87,2	88,3	89,4	90,5	91,6
3	Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan		
Misi 7	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih		
	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Meningkatkan pengamanan batas wilayah kota 3 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan 4 Meningkatkan Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji 5 Meningkatkan fasilitas peringatan hari besar keagamaan 6 Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
2	Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	2 Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	<p>Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan 2 Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD 3 Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum 4 Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 5 Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum 6 Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah <p>Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah 3 Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD 4 Membentuk BPR syariah 5 Mengoptimalkan peran XT square terhadap pemberdayaan UMKM 6 Meningkatkan kualitas kerjasama daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan 2 Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis 3 Meningkatkan fasilitas penyusunan pedoman pelaksanaan APBD 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa 2 Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan 3 Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan 4 Meningkatkan penyelesaian permasalahan pengadaan
<p>3 Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>3 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</p>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah</p> <p>Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumah tanggaan</p> <p>Peningkatan pelayanan kekinisan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Peningkatan Aparatur 2 Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan 3 Meningkatkan pembinaan pelayanan publik 4 Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah 5 Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah 6 Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kerumah tanggaan 2 Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 3 Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Setda ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah **program** peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, **program** penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, **program** pengendalian pelaksanaan pembangunan, **program** pelayanan pengadaan barang/jasa, **program** peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, **program** pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, **program** peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan **program** peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Setda dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				14. Pemeliharaan Patihok Batas antar Kota dan Kabupaten		75 buah		50 buah		50 buah		50 buah		50 buah		275 buah			
				15. Pembuatan peta Administrasi Kelurahan Batas Wilayah			22 Kelurahan									22 Kelurahan			
				16. Pemeliharaan Papan Batas Wilayah		4 bulan										4 bulan			
				17. Fasilitas Tim Koordinasi Pilkada															
		04.03.01A.110.002	Penyelenggaraan dan Bina Administrasi Kecamatan	1. Dokumen money pelaksanaan urusan penda	731.835.966	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	955.714.018	5 dokumen	8.437.505.485	
				2. Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				3. Evaluasi urusan pemerintahan daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				4. Dokumen money pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				5. Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		5 kali		
				6. Evaluasi perwal pelimpahan kewenangan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				7. Pendampingan pelaksanaan pelimpahan kewenangan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				8. Pendampingan teknis pelimpahan kewenangan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		5 kali		
				9. Penyusunan Buku rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen (Semester I dan II)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		10 dokumen		
				10. Penyusunan Data Profil Kelurahan se-kota Yogyakarta		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		5 dokumen		
				11. Pelaksanaan Koordinasi antar kecamatan dan kelurahan dgn SKPD/Instansi		14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel		
				12. Penyusunan Data perangkat kecamatan dan kelurahan		14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel		
				13. SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yg diupgrade			1 SIM										1 SIM		
				14. Evaluasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yk		3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.		3 kec.			
				15. Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan secara elektronik		14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel		
				16. Evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Yogyakarta		45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.	45 Kel.		45 Kel.		
				17. Frekuensi pelepasan, pengenalan, kepengurusan lembaga RT RW dan LPMK se Kota Yogyakarta			1 Kali										1 Kali		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01B 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa Tenaga Bantuan	4 jenis 14 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang	373.325.824						
		04 03 01B 002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	45.200.000	46.556.000	47.952.680	49.391.260	50.872.998	50.872.998	50.872.998	50.872.998	50.872.998	294.647.939	Bag. Hukum	Kec. UH				
		04 03 01B 002 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 unit	15.000.000	15.000.000	15.450.000	15.913.500	16.390.905	16.390.905	16.390.905	16.390.905	16.390.905	77.754.405						
		04 03 01B 002 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	2 unit 4 unit	39.675.000	31.556.000	32.502.680	33.477.760	34.482.093	34.482.093	34.482.093	34.482.093	34.482.093	216.893.534						
		04 03 01B 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	13.500.000	18.000.000	19.096.200	19.669.086	20.259.159	20.259.159	20.259.159	20.259.159	20.259.159	109.064.445	Bag. Hukum	Kec. UH				
		04 03 01B 005 006	Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur	frekuensi bimbingan yang diikuti	3 kali	13.500.000	18.000.000	19.096.200	19.669.086	20.259.159	20.259.159	20.259.159	20.259.159	20.259.159	109.064.445						
		04 03 01B 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	22.214.000	15.397.800	16.335.526	16.825.592	17.330.360	17.330.360	17.330.360	17.330.360	17.330.360	103.963.011	Bag. Hukum	Kec. UH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01B 006 005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKKA, DPA. 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 dokumen	22.214.000	6 dokumen	15.397.800	6 dokumen	15.859.734	6 dokumen	16.335.526	6 dokumen	16.825.592	6 dokumen	17.330.360	6 dokumen	103.963.011		
Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas yang berkeadilan		04 03 01B 106 106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah		100%	3.028.474.850	100%	1.471.532.004	100%	1.515.677.964	100%	1.561.148.303	100%	1.607.982.752	100%	1.656.222.234	100%	10.841.038.105	Bag. Hukum	Kec. UH
		04 03 01B 106 001	Peraturan Perundang-Undangan	1 Draft Raperda 2 Konsinyering 3 Perwal 4 Kepwal 5 Analisis Perwal 6 Naskah Akademik Raperda 7 Naskah Paripurna Raperda 8 Publikasi Raperda ke media cetak 9 Pembahasan Raperda dengan DPRD 1 Perkarasengketa yang ditangani 2 konsultasi hukum untuk masyarakat 3 Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai HAM yang terharmonisasi 1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN 2 Database Produk Hukum Pemkot Yk		18 Raperda 2 kali 50 Perwal 400 Kepwal 7 Analisis Perwal 6 Naskah Akademik Raperda 15 Naskah Raperda 5 Raperda 18 Raperda	1.049.125.000	15 Raperda 40 Perwal 400 Kepwal	726.750.000	10 Raperda 40 Perwal 400 Kepwal	748.552.500	10 Raperda 40 Perwal 400 Kepwal	771.009.075	10 Raperda 40 Perwal 400 Kepwal	794.139.347	10 Raperda 40 Perwal 400 Kepwal	817.963.527	73 Raperda 2 kali 250 Perwal 2400 Kepwal 7 perwal juklak raperda 31 Naskah Akademik 15 naskah Raperda 38 Raperda 18 Raperda	4.907.539.449		
		04 03 01B 106 002	Bantuan Hukum				1.321.330.000	8 perkara 11 Bulan	342.942.000	8 perkara 11 Bulan	353.230.260	8 perkara 11 Bulan	363.827.168	8 perkara 11 Bulan	374.741.983	8 perkara 11 Bulan	385.984.242	54 perkara 11 bulan	3.142.055.653		
		04 03 01B 106 003	Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah				658.019.850	11 bulan	401.840.004	10 bulan	413.895.204	10 bulan	426.312.060	10 bulan	439.101.422	10 bulan	452.274.465	11 bulan	2.791.443.005		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah		250 buku		250 buku		250 buku		250 buku		250 buku		1500 buku					
				4 Anggota JDIIH Pemkot Yk yang dibina		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan					
				5 Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen					
				6 Buku Saku Peraturan		3300 buku		3300 buku		3300 buku		3300 buku		3300 buku		19800 buku					
				7 Website Hukum yang dikelola		1 website		1 website		1 website		1 website		1 website		1 website					
				8 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan					
				9 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat		8 kali sosialisasi		6 kali sosialisasi		6 kali sosialisasi		6 kali sosialisasi		6 kali sosialisasi		38 kali sosialisasi					
				10 Frekuensi Penyaluhan Hukum kepada masyarakat		4 kali penyaluhan		2 kali penyaluhan		4 kali penyaluhan		4 kali penyaluhan		4 kali penyaluhan		22 kali penyaluhan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01C 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	1.333.573.532	100%	1.601.156.676	100%	1.624.191.376	100%	1.672.917.118	100%	1.723.104.631	100%	1.774.797.770	100%	9.729.741.103	Bag. Protokol	Kec. UH
		04 03 01C 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah		42 orang	528.628.000	41 orang	723.944.000	41 orang	740.662.320	41 orang	762.882.190	41 orang	785.768.655	41 orang	809.341.715	41 orang	4.351.226.880		
		04 03 01C 001 019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Materai 6000 3 Materai 3000 4 Perangko 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Peralatan rumah tangga yang tersedia 8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 9 Jasa Pengiriman 10 STNK roda 4 yang terbayar 11 STNK roda 2 yang terbayar 12 Cetak 13 Cetak kartu nama 14 Penggandaan 15 Jilid 16 Sewa mesin fotokopi 17 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota 18 Servis HT 19 Bantuan komunikasi 20 Belanja Modal		70 jenis	546.441.800	64 jenis	701.687.382	64 jenis	702.738.003	64 jenis	723.820.144	64 jenis	745.554.748	64 jenis	767.900.790	64 jenis	4.188.122.867		
		04 03 01C 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang disusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa Tenaga Bantuan 4 Jasa Pengelola Atsip Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		42 orang	315.441.000	41 orang	353.045.750	41 orang	363.637.123	41 orang	374.546.236	41 orang	385.762.623	41 orang	397.356.102	41 orang	2.189.808.834	Bag. Protokol	Kec. UH
		04 03 01C 002 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100%	258.503.732	4 jenis	175.525.294	4 jenis	180.791.053	4 jenis	186.214.784	4 jenis	191.801.228	4 jenis	197.555.265	4 jenis	1.190.391.356		
		04 03 01C 002 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			14 unit	315.441.000	15 unit	353.045.750	14 unit	358.637.123	14 unit	369.396.236	14 unit	380.478.123	14 unit	391.892.467	14 unit	2.168.890.699		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01C 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.750.000	100%	26.522.500	100%	27.318.175	100%	104.590.675	Kec. UH	
								2 kali	25.000.000	2 kali	25.750.000	2 kali	26.522.500	2 kali	27.318.175	2 kali	104.590.675				
						100%	33.780.000	100%	5.932.800	100%	6.110.784	100%	6.294.108	100%	6.482.931	100%	64.360.622	100%	64.360.622		
		04 03 01C 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100%	5.760.000	100%	5.932.800	100%	6.110.784	100%	6.294.108	100%	6.482.931	100%	64.360.622	Kec. UH	
								5	5.760.000	5	5.932.800	5	6.110.784	5	6.294.108	5	64.360.622				
						5	33.780.000	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen		
		04 03 01C 112 001	Program pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		80,00	1.732.840.446	80,25	1.728.433.859	80,45	1.780.286.875	80,65	1.833.695.481	80,75	1.888.706.345	81,00	1.945.367.536	81,00	10.909.330.542	Kec. UH	
						300 kali	245.017.542	1.104 kali	271.534.894	1.104 kali	279.680.941	1.104 kali	288.071.369	1.104 kali	296.713.510	1.104 kali	305.614.915	1.104 kali	1.686.633.171		
						8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang		8 Orang			
		04 03 01C 112 002	Penyenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta	1 Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja 2 Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga 3 Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi 4 Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 5 Jumlah naskah sambutan		20 kali	1.246.182.830	17 kali	1.322.632.386	20 kali	1.362.311.358	20 kali	1.403.180.698	20 kali	1.445.276.119	20 kali	1.488.634.403	20 kali	8.288.217.794	Kec. UH	
						13 kali		13 kali		13 kali		13 kali		13 kali		13 kali		13 kali			
						180 kali		180 kali		180 kali		180 kali		180 kali		180 kali		180 kali			
		04 03 01C 112 003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	1 Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli 2 Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 3 Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli		176 kali	241.640.074	176 kali	134.266.579	176 kali	138.294.576	176 kali	142.443.414	176 kali	146.716.716	176 kali	151.118.218	176 kali	954.479.577	Kec. UH	
						232 kali		240 kali		240 kali		240 kali		240 kali		240 kali		240 kali			
						92 kali		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Seida		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		04 03 01D 001	Program Pelembagaan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	513.664.926	100%	501.922.274	100%	516.979.942	100%	532.489.340	100%	548.464.021	100%	564.917.941	100%	3.178.438.445	Bag. Umum	Kec. UH	
		04 03 01D	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		24 orang	24.068.000	25 orang	26.378.000	25 orang	27.169.340	25 orang	27.984.420	25 orang	28.823.953	25 orang	29.688.671	25 orang	164.112.384	Bag. Umum	Kec. UH	
		04 03 01D	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia 3 Material 6000 yang tersedia 4 Material 3000 yang tersedia 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Jenis BBM dan pelumas genset 8 Jenis peralatan kerja 9 Jenis pemeliharaan peralatan kerja 10 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia 11 Peralatan rumah tangga yang tersedia 12 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 13 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 14 STNK roda 6 yang terbayar 15 STNK roda 4 yang terbayar 16 STNK roda 2 yang terbayar 17 Jasa percetakan 18 Jasa pengandaan Lembar 19 Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair 20 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahangaan		78 Jenis	213.945.600	75 Jenis	348.078.034	76 Jenis	358.520.375	76 Jenis	369.275.986	76 Jenis	380.354.266	76 Jenis	391.764.894	76 Jenis	2.061.939.155	Bag. Umum	Kec. UH	
						15 Jenis		17 Jenis		17 Jenis		17 Jenis		17 Jenis		17 Jenis		16 jenis				
						200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah				
						500 Buah		500 Buah		500 Buah		500 Buah		500 Buah		500 Buah		500 Buah				
						22 Jenis		23 Jenis		22 Jenis		22 Jenis		22 Jenis		22 Jenis		22 Jenis				
						2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis				
						1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
						8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit				
						9 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit				
						8 Jenis		14 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis				
						Lembar		158.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar				
						10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit				
								9 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Seida	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				21 Belanja bahan/ bibit tanaman 22 Jasa pemeliharaan peralatan kerja 23 Mesin pompa air 24 Tangki lipat 25 Notebook 26 Kursi rapat 27 Meja TV LED 28 Mic 29 Mesin Fax		8 Jenis 1 Jenis 2 unit 1 unit 50 unit 2 unit 5 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	8 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit						
		04 03 01D 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian 3 Jasa tenaga bantuan	4 jenis 24 dokumen ASN 5 orang	4 jenis 25 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	952.386.905	Kec. UH				
		04 03 01D 002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	189.399.000	195.080.970	200.933.399	206.961.401	213.170.243	213.170.243	213.170.243	213.170.243	213.170.243	213.170.243	1.156.064.013	Kec. UH				
		04 03 01D 002 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan/ kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan/ kantor/tempat	8 unit	20.000.000	51.927.450	53.485.274	55.089.832	56.742.527	56.742.527	56.742.527	56.742.527	56.742.527	56.742.527	287.660.082	Kec. UH				
		04 03 01D 002 024	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 3 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	1 unit 8 unit 9 unit	130.519.000	143.153.520	147.448.126	151.871.569	156.427.716	156.427.716	156.427.716	156.427.716	156.427.716	156.427.716	868.403.931	Kec. UH				
		04 03 01D 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. UH				
		04 03 01D 005 006	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur														Kec. UH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Seida			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		04 03 01D 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	43.197.000	100%	780.000	100%	803.400	100%	827.502	100%	852.327	100%	877.897	100%	47.338.126	Bag. Umum	Kec. UH		
		04 03 01D 005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen		43.197.000		780.000		803.400		827.502		852.327		877.897		47.338.126	5 dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
				2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen															5 dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
				3 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen															5 dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
				4 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen															5 dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Kualitas kebijakan pelayanan publik yang meningkat	04 03 01D 113	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahanggaan		78,0	2.768.716.377	78,5	2.673.413.507	79,0	2.753.615.912	79,5	2.836.224.390	80,0	2.921.311.121	80,5	3.008.950.455	16.962.231.762	80,5	16.962.231.762	80,5	Bag. Umum	Kec. UH
		04 03 01D 113 001	Pelayanan Kerumahanggaan	1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen		1.993.625.327	1 Dokumen	2.211.648.200	1 Dokumen	2.277.997.646	1 Dokumen	2.346.337.575	1 Dokumen	2.416.727.703	1 Dokumen	2.489.229.534	13.735.565.985	1 Dokumen	13.735.565.985	1 Dokumen	Bag. Umum	Kec. UH
				2 Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen															1 Dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
				3 Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen															1 Dokumen	Bag. Umum	Kec. UH	
				4 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk	1 lokasi															1 lokasi	Bag. Umum	Kec. UH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran		100%	485.664.896	100%	537.172.744	100%	553.287.926	100%	569.886.564	100%	586.983.161	100%	604.592.656	100%	3.337.587.947	Bag. P3ADK Kec. UH	
		04 03 01E 001 013	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2. Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 3. Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 4. Laporan hasil koordinasi		44 kali	267.040.000	44 kali	284.058.000	33 kali	292.579.740	33 kali	301.357.132	33 kali	310.397.846	33 kali	319.709.782	33 kali	1.775.142.500		
		04 03 01E 001 019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1. Materi 3000 yang tersedia 2. Materi 6000 yang tersedia 3. Jasa Pengiriman/paket 4. STNK roda 4 yang terbayar 5. STNK roda 2 yang terbayar 6. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7. Jasa kebersihan kantor 8. Alat tulis kantor yang tersedia 9. Jasa percetakan 10. Jasa pengandaan 11. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 12. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 13. Peraturan perundang-undangan yang tersedia 14. Jasa perbaikan peralatan kerja 15. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 16. Peralatan rumah tangga yang tersedia 17. Jasa pemeliharaan taman. 18. Jasa bantuan komunikasi		300 buah	122.195.400	300 buah	162.527.000	300 buah	167.402.810	300 buah	172.424.894	300 buah	177.597.641	300 buah	182.925.570	300 buah	985.073.316		
						175 buah		175 buah		175 buah		175 buah		175 buah		175 buah		175 buah			
						2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket			
						2 kendaraan		2 kendaraan		2 kendaraan		2 kendaraan		2 kendaraan		2 kendaraan		2 kendaraan			
						4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan		4 kendaraan			
						10 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis			
						1 jenis		637 m2		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
						50 jenis		34 jenis		34 jenis		34 jenis		34 jenis		34 jenis		34 jenis			
						2 jenis		7 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis			
						116.000 lembar		110.000 lembar		120.000 lembar		120.000 lembar		120.000 lembar		120.000 lembar		120.000 lembar			
						4 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis			
						4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis			
						2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
								7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
						16 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis			
						1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis			
						6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan		6 bulan			
								12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Sekda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Dokumen administrasi perusahaan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang terusun 2. Dokumen administrasi kepegawalan yang dikelola 3. Jasa tenaga bantuan 4. Jasa pengibahan arsip	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	96.429.496	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	90.587.744	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	93.305.376	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	96.104.538	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	98.987.674	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	101.957.304	4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang	577.372.132			
		04 03 01E 002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai 1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 2. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100% 2 paket 2 unit 4 unit	206.720.000 146.640.000 60.080.000	100% 1 gedung 2 buah 4 buah	98.207.140 33.000.000 65.207.140	100% 1 unit 2 unit 4 unit	101.153.354 33.990.000 67.163.354	100% 1 unit 2 unit 4 unit	104.187.955 35.009.700 69.178.255	100% 1 unit 2 unit 4 unit	107.313.593 36.059.991 71.253.602	100% 1 unit 2 unit 4 unit	110.533.001 37.141.791 73.391.211	100% 1 unit 2 unit 4 unit	728.115.044 321.841.482 406.273.562	Bag. P3ADK	Kec. UH	
		04 03 01E 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	14.000.000	100%	20.000.000	100%	20.600.000	100%	21.218.000	100%	21.854.540	100%	22.510.176	100%	120.182.716	Bag. P3ADK	Kec. UH	
		04 03 01E 006	Bimbingan teknis dan alat peningkatan kapasitas aparatur	frekuensi bintek yang diikuti	2 kali	14.000.000	4 kali	20.000.000	2 kali	20.600.000	2 kali	21.218.000	2 kali	21.854.540	2 kali	22.510.176	2 kali	120.182.716			
		04 03 01E 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	25.075.000	100%	3.770.000	100%	3.883.100	100%	3.999.593	100%	4.119.581	100%	4.243.168	100%	45.090.442	Bag. P3ADK	Kec. UH	
		04 03 01E 006 005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang terusun 2. Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang terusun	5 dokumen 6 jenis laporan	25.075.000	5 dokumen 5 dokumen	3.770.000	5 dokumen 5 dokumen	3.883.100	5 dokumen 5 dokumen	3.999.593	5 dokumen 5 dokumen	4.119.581	5 dokumen 5 dokumen	4.243.168	5 dokumen 5 dokumen	45.090.442			
		04 03 01E 114	Program Peningkatan Perekonomian, Pembangunan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp545 milyar	1.307.360.415	Rp547 milyar	681.645.793	Rp559 milyar	702.095.167	Rp571 milyar	723.158.022	Rp583 milyar	744.852.762	Rp595 milyar	767.198.345	Rp595 milyar	4.926.310.504	Bag. P3ADK	Kec. UH	
Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	04 03 01E 114 001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)	1. Data Pendapatan Asli Daerah 2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah 3. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	583.177.415	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	128.556.193	130.352.879	134.263.465	138.291.369	142.440.110	142.440.110	142.440.110	142.440.110	142.440.110	142.440.110	1.285.081.431			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi								
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp						
				7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen									
				8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen							
				9 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen							
				10 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC		10 Koordinasi		10 Koordinasi		15 Koordinasi		15 Koordinasi		10 Koordinasi		10 Koordinasi		10 Koordinasi		10 Koordinasi							
				11 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC		4 luran		4 luran		4 luran		4 luran		4 luran		4 luran		4 luran		4 luran							
				12 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018				1 kali																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01F 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	192.341.850	100%	226.462.675	100%	233.256.555	100%	240.254.252	100%	247.461.879	100%	254.885.736	100%	1.394.662.947	Bag. Daibang	Kec. UH
		04 03 01F 001 018	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 4 Laporan hasil koordinasi		33 kali	12.174.000	33 kali	22.616.000	33 kali	23.294.480	33 kali	23.993.314	33 kali	24.713.114	33 kali	25.454.507	188 kali	132.245.415		
		04 03 01F 001 019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor tersedia 3 Material 3000 yang tersedia 4 Material 6000 yang tersedia 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 7 Peralatan rumah tangga tersedia 8 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 9 Biaya administrasi bank 10 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 11 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 12 Jasa Pengandaan 13 Jasa perbaikan peralatan kerja 14 Jasa pemeliharaan komputer 15 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 16 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala		63 jenis	153.937.850	60 Jenis	196.356.525	60 Jenis	202.247.221	60 Jenis	208.314.637	60 Jenis	214.564.076	60 Jenis	221.000.999	60 Jenis	1.196.421.308		
		04 03 01F 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi pegawai yang terkeleba 3 Jasa Pengelola arsip		4 jenis	26.230.000	4 jenis	7.490.150	4 jenis	7.714.955	4 jenis	7.946.300	4 jenis	8.184.689	4 jenis	8.430.230	4 jenis	65.996.224		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		04 03 01F 002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	144.652.514	100%	147.839.793	100%	152.274.987	100%	156.843.236	100%	161.548.533	100%	166.394.989	100%	929.554.053	Bag. Daibang	Kec. UH
						1 unit	85.477.514	1 unit	95.183.793	1 unit	98.039.307	1 unit	100.980.486	1 unit	104.009.901	1 unit	107.130.198	1 unit	590.821.198		
						2 unit	59.175.000	2 unit	52.656.000	2 unit	54.235.680	2 unit	55.862.750	2 unit	57.538.633	2 unit	59.264.792	2 unit	338.732.855		
		04 03 01F 002 022	Pemeliharaan gedung/kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tepat		100%	85.477.514	100%	95.183.793	100%	98.039.307	100%	100.980.486	100%	104.009.901	100%	107.130.198	100%	590.821.198	Bag. Daibang	Kec. UH
						1 unit	85.477.514	1 unit	95.183.793	1 unit	98.039.307	1 unit	100.980.486	1 unit	104.009.901	1 unit	107.130.198	1 unit	590.821.198		
						2 unit	59.175.000	2 unit	52.656.000	2 unit	54.235.680	2 unit	55.862.750	2 unit	57.538.633	2 unit	59.264.792	2 unit	338.732.855		
		04 03 01B 005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bag. Daibang	Kec. UH
						100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
						3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-		
		04 03 01F 006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	27.987.700	100%	9.500.250	100%	9.785.258	100%	10.078.815	100%	10.381.180	100%	10.692.615	100%	78.435.817	Bag. Daibang	Kec. UH
						5 dokumen	27.987.700	5 dokumen	9.500.250	5 dokumen	9.785.258	5 dokumen	10.078.815	5 dokumen	10.381.180	5 dokumen	10.692.615	30 dokumen	78.435.817		
						5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	5 dokumen	-	30 dokumen	-		
		04 03 01F 115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		93,0%	902.900.434	93,5%	636.147.456	94,0%	655.231.880	94,5%	674.888.836	95,0%	695.135.501	95,5%	715.989.566	95,5%	4.280.293.673	Bag. Daibang	Kota Jogja
						1 dokumen	58.667.000	1 dokumen	50.177.310	1 dokumen	51.682.629	1 dokumen	53.233.108	1 dokumen	54.830.101	1 dokumen	56.475.004	1 dokumen	325.065.153		
						1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-		
		04 03 01F 115 001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	1 Renstra Setda 2 Review Renstra Setda 3 RUP Setda 4 SOP PEP 5 Petunjuk teknis 6 LKIP Setda 7 Laporan koordinasi penataan sanitasi Renja Setda 8 Renja Setda 9 Perjanjian kinerja Setda 10 Pengukuran kinerja Setda 11 KAK perangkat daerah		1 dokumen	58.667.000	1 dokumen	50.177.310	1 dokumen	51.682.629	1 dokumen	53.233.108	1 dokumen	54.830.101	1 dokumen	56.475.004	1 dokumen	325.065.153	Bag. Daibang	Kota Jogja
						1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-		
						2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		04 03 01G 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	461.593.541	100%	746.328.312	100%	748.718.161	100%	771.179.706	100%	794.315.097	100%	818.144.550	100%	4.340.279.368	Beg. Organisasi	Kec. UH	
		04 03 01G 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 4 Laporan hasil koordinasi	40 kali 22 orang 20 kali 15 laporan	162.128.000	283.776.000	282.589.280	291.066.958	299.798.967	308.792.936	308.792.936	308.792.936	308.792.936	308.792.936	308.792.936	308.792.936	308.792.936	1.638.152.142			
		04 03 01G 001 019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Materi 3000 yang tersedia 2 Materi 6000 yang tersedia 3 Jasa Pengiriman / Paket 4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer 5 STNK roda 4 yang terbayar 6 STNK roda 2 yang terbayar 7 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 8 Alat tulis kantor yang tersedia 9 Jasa percetakan 10 Jasa Penggandaan 11 komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia 12 komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 13 Buku peraturan undangan yang tersedia 14 bahan bacaan /surat kabar yang tersedia	560 Buah 150 Buah 15 kali 10 komputer/aplopp, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 8 printer, 2 Unit 3 Unit 26 jenis 61 jenis 1 jenis 336.021 lembar 9 jenis 22 jenis 10 buku 2 surat kabar	195.030.150	364.429.045	375.361.916	386.622.774	398.221.457	410.168.101	410.168.101	410.168.101	410.168.101	410.168.101	410.168.101	410.168.101	410.168.101	2.129.833.443			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	04 03 01G 116	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30 dokumen		Bag. Organisasi Kec. UH				
				60%	3.948.688.916	70%	1.847.483.192	80%	1.902.907.688	90%	1.959.994.918	95%	2.018.794.766	100%	2.079.358.609	100%		13.757.228.089			
				49 OPD/unit kerja	951.155.415	-	567.675.193	-	584.705.449	-	602.246.612	-	620.314.011	-	638.923.431	-		3.965.020.111			
				21 OPD/unit kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		21			
				50 OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		50			
				1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1			
				1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1			
				-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	5		
				-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	5		
				-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	5		
				-	-	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja	18 PD/unit kerja		18 PD/unit kerja	21 PD/unit kerja		
				-	-	13 PD/unit kerja	13 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja		14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja		
				-	-	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja		14 PD/unit kerja	14 PD/unit kerja		
				-	-	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja	4 PD/unit kerja		4 PD/unit kerja	12 PD/unit kerja		
				-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	5 dokumen		
				-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	5 dokumen		
-	-	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja	15 PD/unit kerja							
-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				6. Laporan pendampingan penyusunan SOP		Target SOP 45 kelurahan	Rp	Target SOP 50 UPT	Rp	Target SOP 16 SMP	Rp	Target SOP 90 SD dan 3 TK	Rp	Target	Rp	Target SOP 45 kelurahan, 50 UPT, 16 SMP, 90 SD dan 3 TK	Rp				
				7. Laporan pendampingan tatalaksana		15 PD/unit kerja		10 PD/unit kerja		10 PD/unit kerja		10 PD/unit kerja		-		50 PD/unit kerja					
				8. Laporan Pembinaan Pelayanan Publik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		-		5 dokumen					
				9. Laporan Monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik		1 dokumen money ketatalaksanaan dan anaan dan PP		1 dokumen money ketatalaksanaan dan anaan dan PP		1 dokumen money ketatalaksanaan dan anaan dan PP		1 dokumen money ketatalaksanaan dan anaan dan PP		-		5 dokumen money ketatalaksanaan dan anaan dan PP					
				10. Laporan pendampingan SPP		1 PD/unit kerja		1 PD/unit kerja		1 PD/unit kerja		1 PD/unit kerja		-		5 PD/unit kerja					
				11. Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM		-		10 laporan pencapaian SPM					
				12. frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti:		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		-		5 kali					
				13. Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan		1 dokumen pelayanan perizinan		-		-		-		-		1 dokumen pelayanan perizinan					
				14. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		-		5 dokumen					
				15. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		-		10 dokumen					
				16. dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		-		10 dokumen					
				17. laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		-		5 dokumen					
				18. Kajian Regulasi perizinan		-		1 dokumen kajian		-		-		-		1 dokumen kajian					
				19. Review Analisa Standar Belanja		-		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen					
		04 03 01G 116		1. dokumen evaluasi kelembagaan RSUD		1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
				Pemantapan perangkat daerah dan reformasi		375.650.133		386.919.699		398.527.290		410.483.103		422.797.602		1.994.377.892					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi									
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp							
			birokrasi	2 dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen										
				3 dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan banosa		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				4 Laporan evaluasi rincian tugas dinas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				5 Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				6 Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				7 Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
				8 Dokumen kajian kelembagaan		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		1 dokumen kajian		
				9 Laporan penataan kelembagaan UPT		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				10 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan manajemen perubahan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				11 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				12 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				13 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				14 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				15 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				16 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				17 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan manajemen SDM Aparatur			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				18 Laporan evaluasi kinerja organisasi			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				19 Laporan kajian kebijakan			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				20 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				21 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		
				22 Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik			1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	5	dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		04 03 01H 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	508.429.795	100%	666.589.885	100%	686.587.582	100%	707.185.209	100%	728.400.765	100%	750.252.788	100%	4.047.446.024	Bag. Layanan Pengadaan	Kec. UH	
		04 03 01H 001 018	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1 Mekan dan minum yang tersedia untuk: a. Koordinasi b. Pegawai c. Tamu 2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		297 kali	109.354.000	33 Kali	252.394.000	33 Kali	259.965.820	33 Kali	267.764.794,60	33 Kali	275.797.738	33 Kali	284.071.670,59	33 Kali	1.449.348.024			
		04 03 01H 001 019	Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Materi 3000 yang tersedia 2 Materi 6000 yang tersedia 3 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnnya 4 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnnya 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Jasa Kebersihan Kantor 7 Alat tulis kantor yang tersedia 8 Jasa Pengandaan 9 Jasa pencetakan 10 Jasa sewa mesin fotocopy 11 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia 12 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 17 Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia 18 Bantuan komunikasi		600 Buah	210.578.219	600 buah	277.881.525	600 buah	286.217.971	600 buah	294.804.509,87	600 buah	303.648.645	600 buah	312.758.104,52	600 buah	1.685.886.974			
						150 Buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah						
						2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit						
						2 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit						
						18 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis		18 jenis						
						12 Bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
						70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis		70 Jenis						
						15.000 Lembar		10.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar		30.000 lembar						
						1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis						
						1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit						
						6 Jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis						
						2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis						
						2 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis						
						5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis						
						21 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis						
						7 Jenis		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali						
						7 Jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis						
								12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan						
						4 jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis						
		04 03 01H 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi		188.497.576		136.314.360		140.403.791		144.615.904,52		148.954.381,66		153.423.013,11						912.209.026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Indikator Sasaran :								
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
2.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	2,12%	2,08%	2,08%	2,08%
3.	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	87,2	88,3	89,4	90,5	91,6	91,6	91,6
4.	Indeks Pelayanan publik	79,75	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00	81,00

Kondisi kinerja awal periode untuk indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) lebih tinggi daripada tahun setelahnya dikarenakan terjadi perubahan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu terdapat kewenangan yang beralih ke Pemerintah Provinsi namun perubahan tersebut belum diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.